

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN  
AIR LIMBAH ( IPAL) DALAM RANGKA MENINGKATKAN SANITASI  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

oleh :

**Nurul Fadila Mustofa**  
**NPM : 177310364**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Nurul Fadila Mustofa  
NPM : 177310364  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 19 April 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Pembimbing

**Dr. Zainal, S.Sos., M.Si**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nurul Fadila Mustofa  
NPM : 177310364  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 19 April 2021

Ketua,  
  
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris,  
  
Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota  
  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP.MA

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fadila Mustofa  
NPM : 17731364  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 19 April 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris,



Data Wardana, S.Sos., M.IP

Ketua,  


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu pemerintahan yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pemilihan judul usulan penelitian ini sehingga layak diangkat sebagai suatu karya ilmiah;
4. Bapak Dr. Zainal,S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Agus Mustofa dan Ibu Zurina yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Saudara laki-laki penulis Rian Mustofa yang telah memberikan penulis semangat dan motivasi sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 Kelas A, dan khususnya teman terdekat saya yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan usulan penelitian dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, 19 April 2021  
Penulis,

**Nurul Fadila Mustofa**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan .....	16
2. Konsep Efektivitas Kebijakan .....	20
3. Konsep Kebijakan Publik .....	25
4. Konsep Pembangunan IPAL .....	31
5. Konsep Sanitasi .....	44

6. Konsep Organisasi Pemerintahan .....	45
B. Penelitian Terdahulu .....	48
C. Kerangka Pikiran.....	50
D. Konsep Operasional .....	51
E. Operasional Variabel.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian .....	55
C. Informan Penelitian .....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Teknik Analisis Data .....	59
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	60
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Letak Geografis Daerah Penelitian .....	61
B. Penduduk .....	63
C. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru .....	64
D. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	66
1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	66
2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	66



E.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	71
1.	Visi dan Misi Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	72
2.	Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	73
3.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	74
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>76</b>
A.	Identitas Responden .....	76
B.	Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi Di Kota Pekanbaru .....	77
1.	Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah .....	79
2.	Efesiensi .....	84
3.	Kepuasan .....	88
C.	Faktor- Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi Di Kota Pekanbaru .....	91
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>93</b>
A.	Kesimpulan .....	93
B.	Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA.....97**

**LAMPIRAN ..... 103**



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Efektivitas Kebijakan Pengadaan Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.....	48
Tabel II.2	Operasional Variabel Efektivitas Kebijakan Pengadaan Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru .....	52
Tabel III.1	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Kebijakan Pengadaan Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru .....	60
Tabel IV.1	Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kota Pekanbaru .....	62
Tabel IV.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru .....	63
Tabel V.1	Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait Tentang Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Diagram Tahapan Kebijakan Publik .....	27
Gambar II.2	Skema Tahapan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga / Domestik .....	38
Gambar II. 3	Perencanaan Jaringan Saluran pembuangan Air Limbah Pekanbaru tahun 2015 .....	41
Gambar II. 4	Perencanaan Jaringan Saluran pembuangan Air Limbah Pekanbaru tahun 2020 .....	42
Gambar II. 5	Perencanaan Jaringan Saluran pembuangan Air Limbah Pekanbaru tahun 2030 .....	43
Gambar II.6	Kerangka Pemikiran Efektifitas Kebijakan Pengadaan Pengelolaan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.....	51
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .....	70
Gambar IV.2	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru .....	75

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Nurul Fadila Mustofa  
NPM : 177310364  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 April 2021



1000  
METERAN  
GEMBEL  
784E6AJX224351777

**Nurul Fadila Mustofa**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH ( IPAL) DALAM RANGKA MENINGKATKAN SANITASI DI KOTA PEKANBARU**

**ABSTRAK**

Oleh  
**Nurul Fadila Mustofa**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut. Indikator yang digunakan meliputi produksi, efisiensi, dan kepuasan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat dikatakan efektif dikarenakan kebijakan tersebut memang diperlukan bagi kota pekanbaru yang dapat dikatakan kota yang padat penduduk. selain itu, dalam penerapan kebijakan IPAL sendiri sudah berjalan dan sedang dalam tahap pembangunan, namun dalam pembangunannya tersebut masih ditemukan beberapa hambatan seperti belum tercapainya target sambungan pipa yang totalnya 11.000 yang menjadi tantangan bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sendiri, meskipun demikian pemerintah tetap melakukan pembangunan sampai target tersebut tercapai namun dengan cara bertahap.

**Kata Kunci : Efektivitas, IPAL, Sanitasi**

**EFFECTIVENESS OF COMMUNAL DOMESTIC WASTEWATER  
TREATMENT PLANT IN ORDER TO IMPROVE SANITATION IN  
PEKANBARU CITY**

**ABSTRACT**

**By**

**Nurul Fadila Mustofa**

This research aims to know the Effectiveness of Wastewater Treatment Plant Procurement Policy in order to Improve Sanitation in Pekanbaru City and know what are the inhibitory factors in the Effectiveness of Wastewater Treatment Plant Procurement Policy. Indicators used include production, efficiency, and satisfaction. This research was conducted at the Public Works and Spatial Planning Office of Pekanbaru City and the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office using Qualitative Descriptive research methods. Data collection using observation techniques, interviews and documentation. The results of this study show that the Effectiveness of Wastewater Treatment Plant Procurement Policy can be said to be effective because the policy is necessary for pekanbaru city which can be said to be a densely populated city. in addition, in the implementation of Wastewater Treatment Plant Procurement Policy itself is already underway and under construction, but in its development there are still some obstacles such as the achievement of the target of pipeline connection totaling 11,000 which is a challenge for the central government or the local government itself, furthermore, the government continues to carry out development until the target is achieved but in a gradual way.

**Keywords: Effectiveness, Communal Domestic Wastewater Treatment Plant,  
Sanitation**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Lagi pula desentralisasi pemerintahan sesungguhnya bukan khas negara kesatuan atau negara federal, tetapi sistem yang umum digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Termasuk untuk mencapai tujuan lainnya, seperti menciptakan keadilan, mengembangkan demokrasi di daerah dan sebagainya.

Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing yang ada di daerah. Tugas – tugas pokok pemerintah daerah tersebut dapat dibagi menjadi 3 fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Berfokus kepada pembangunan yang menjadi kewajiban pada setiap daerah yang tidak hanya bertugas untuk membangun tetapi juga mengelola, salah satunya adalah lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) bahwa lingkungan hidup adalah segala kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.. Dari bu nyi undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan terdiri dari 2 komponen yaitu komponen hidup (makhluk hidup) dan komponen tak hidup yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem.

Sumber daya air merupakan sumber daya alam non hayati dan dapat diperbaharui, artinya air termasuk sumber daya alam yang jika habis dapat diperbaharui lagi. Namun jika badan air terus menerus tercemar oleh limbah maka suatu saat air yang bersih akan langka. Untuk itu penggunaan air harus efisien dan selalu dijaga oleh pemerintah daerah agar tidak tercemar zat-zat berbahaya dan lingkungan masyarakat tetap terjaga.

Indonesia menghadapi permasalahan pemukiman , social , ekonomi , dan lingkungan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi terutama wilayah perkotaan akan meningkatkan aktivitas perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan yang secara terus menerus akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Maka dari itu penting bagi masyarakat berupaya untuk mewujudkan dan menjamin kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terutama lingkungan fisik berupa air, tanah, dan udara yang disebut sanitasi. Masyarakat harus membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Dengan terwujudnya kondisi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan maka proses produksi yang sehat dan aman bagi manusia.

Alam memiliki kemampuan dalam menetralkan pencemaran akibat limbah apabila jumlahnya kecil. Oleh karena itu limbah sebagai hasil dari berbagai aktivitas penduduk perkotaan yang semakin beragam harus diolah agar tidak mencemari lingkungan. Berbagai aktivitas sehari – hari yang dianggap sepele namun menghasilkan sisa buangan ternyata membahayakan lingkungan. Kepadatan penduduk perkotaan yang tinggi dengan limbah rumah tangga atau domestik yang tinggi dan tidak diolah, tentunya berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih besar dari pada limbah industri.

Air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air bersih dan air minum adalah air sumur gali. Potensi air tanah bervariasi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, dengan demikian pula permasalahan yang timbul juga tidak sama, namun secara umum dapat dikatakan bahwa pada setiap daerah telah terjadi penurunan cadangan air tanah serta penurunan kualitas tanah. Karena manusia dalam kehidupannya sehari-hari tidak lepas dari berbagai aktivitas yang dapat menyebabkan bertambahnya kuantitas limbah cair dan salah satu sumber penghasilnya berasal dari rumah tangga. Meningkatnya aktivitas manusia di rumah tangga menyebabkan semakin besarnya volume limbah yang dihasilkan dari waktu ke waktu

Dikarenakan pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan yang antara lain pencemaran air limbah. Pengelolaan limbah pada sumbernya merupakan upaya yang harus dilaksanakan pertama kali oleh pemerintah daerah karena upaya ini bersifat preventif yaitu mencegah atau

mengurangi terjadinya limbah yang tidak aman dan proses pengelolaan limbah yang benar. Adanya pengaliran air limbah rumah tangga ke sungai oleh manusia akan menyebabkan penurunan kualitas air. Hal ini dapat terjadi karena masuknya limbah ke badan air.

Limbah sendiri merupakan sisa suatu usaha dan/ kegiatan. Penurunan kualitas air pada sungai merupakan salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan hidup. Air limbah domestic merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan. Apartemen dan asrama (keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik) . atau Air Limbah Domestik bisa disebut juga limbah rumah tangga yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama (Kepmen LH Nomor 112/2003 dalam buku Statistik Lingkungan Hidup 2018).

Limbah domestik saat ini menjadi permasalahan bagi sejumlah kota besar yang pada penduduknya seperti Jakarta, Yogyakarta, Medan, begitu pula kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi kawasan industri, telah ditetapkan batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang dapat di toleransi keberadaannya dalam air limbah untuk dibuang ke perairan dari suatu kegiatan tertentu. Baku mutu air limbah tersebut berfungsi sebagai pengendalian pencemaran perairan. Dengan memperhatikan baku mutu air tersebut, maka

sungai yang merupakan salah satu sumber air bersih bagi masyarakat diharapkan tidak tercemar sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya .

Masyarakat pun diharapkan ikut andil dan menjalankan program sanitasi lingkungan di daerah masing masing. Sanitasi ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat dan nyaman. Lingkungan yang sanitasinya buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Pada akhirnya jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraannya juga akan berkurang, oleh karena itu upaya sanitasi lingkungan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Konsekuensi dari bertambahnya jumlah penduduk suatu kota adalah meningkatnya kebutuhan sarana prasarana kota dan infrastruktur lainnya, termasuk kebutuhan perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia. Rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung, tetapi juga mempunyai arti penting dalam pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Maka dari itu perlu di lakukan pembangunan permukiman yang juga melihat aspek lingkungan yang layak dan terjaga sanitasinya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih merupakan cara yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Kondisi demikian jika tidak terkendali akan berdampak buruk terhadap penurunan muka air tanah dan ancaman pencemaran air tanah dari limbah industri dan limbah domestik terutama limbah tinja buangan manusia.

Untuk mewujudkan rumah yang layak dan sanitasi lingkungan yang sehat diperlukan kebijakan yang jelas dan konsekuen dari pemerintah, terutama dalam

menjaga kualitas air bersih bagi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi penting mengingat perumahan sederhana memiliki luas lahan yang sangat terbatas, dan dengan keterbatasan tersebut, sangat mungkin jarak antara *septic tank* dengan sumur akan berdekatan dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Akibat pembangunan *septic tank* rumah tangga yang tidak memenuhi syarat seringkali mengalami kebocoran dan mencemari air tanah, sehingga air tanah di perkotaan tercemar tinja, sedangkan separuh penduduk kota menggunakan air tanah untuk kebutuhan hariannya. Kebutuhan air bersih di lokasi-lokasi perumahan hampir seluruhnya dipenuhi dengan memanfaatkan air tanah. Air tanah yang tercemar, terutama disebabkan oleh tinja yang berasal dari *septic tank* akan berdampak buruk terhadap kesehatan penggunanya.

Maka Pembangunan IPAL komunal ditujukan untuk mengelola limbah permukiman untuk meningkatkan kualitas permukiman sehingga air sumur yang bersih dan sehat dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya dapat meminimalisir permukiman kumuh dalam perkotaan sehingga dapat tercipta permukiman-permukiman yang bersih. Hal tersebut perlu untuk dilakukan karena perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam melangsungkan hidupnya. Peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman secara terarah, terpadu, terencana, dan berkesinambungan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan air limbah di kawasan permukiman.

IPAL komunal adalah suatu akses sanitasi untuk memperbaiki kualitas air minum dan mengendalikan pencemaran air sungai dan lingkungan. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa

sanitasi yang tidak layak menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sanitasi yang buruk menjadikan pertumbuhan balita menjadi terganggu, padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dengan baik agar kecerdasan mereka pun mengantarkan pada masa depan yang cerah.

Yuwono dalam Saputri (2018) menjelaskan bahwa akibat buruknya sanitasi, rata-rata keluarga Indonesia kehilangan Rp. 1,25 juta setiap tahun, untuk menutup biaya berobat, perawatan rumah sakit, dan hilangnya pendapatan harian akibat menderita sakit atau harus menunggu keluarga yang sakit. Hal tersebut nantinya mendorong kerugian ekonomi karena kematian dini, menurunkan produktivitas kerja, meningkatkan absen pada saat jam kerja atau jam sekolah, serta kerugian lainnya. Selain itu, Untuk setiap 1 USD yang diinvestasikan untuk sanitasi, kita mencegah pengeluaran sebesar 36 USD untuk pemulihan kualitas air sungai.

Dengan demikian jelaslah bahwa perbaikan sanitasi harus dilakukan untuk mencegah kerugian-kerugian yang nantinya dipakai untuk pemulihan karena kerusakan yang pernah terjadi. Sanitasi sangat menentukan keberhasilan dari paradigma pembangunan kesehatan lingkungan yang mana lebih menekankan pada aspek pencegahan dari aspek pengobatan. Dengan adanya upaya pencegahan yang baik, angka kejadian penyakit yang terkait dengan kondisi lingkungan dapat dicegah. Hal tersebut juga dapat meminimalisir anggaran karena anggaran yang dipakai untuk upaya preventif lebih terjangkau daripada pengobatan.

Kesehatan lingkungan tidak terlepas dari kelayakan sanitasi di suatu wilayah. Rumah tangga dikatakan menggunakan sanitasi layak jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, menggunakan jenis kloset leher angsa atau plesengan dengan tertutup dan tempat pembuangan akhir tinja tangki septic atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Menurut data BPS, pada tahun 2017 rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak hanya sebesar 67,89 persen. Kesadaran sanitasi sudah baik di rumah tangga perkotaan, dilihat dari hanya satu dari lima rumah tangga di perkotaan yang tidak menggunakan sanitasi layak, namun setengah jumlah rumah tangga di perdesaan tidak menggunakan sanitasi layak (Statistik Lingkungan Hidup 2018)

IPAL Komunal merupakan infrastruktur pengolahan limbah yang baik, sehingga limbah domestik tersebut diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke badan air agar nantinya badan air tersebut tidak tercemar. Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan wilayah. Infrastruktur berperan penting dalam perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran tersebut dapat diwujudkan dalam aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang kebijakan dan strategi nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut berisi tentang strategi yang harus dilakukan yakni (1) Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat, (2) Peningkatan peran



masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, (3) Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelola air limbah permukiman, (4) Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman, (5) Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman. Lalu Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) kepada seluruh masyarakat.

Kota Pekanbaru sejak tahun 2010 telah menjadi kota ketiga yang penduduknya terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Kota pekanbaru yang cukup pesat menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, utamanya di sebabkan oleh (Ramadhani, 2015) :

- a) Perencanaan sanitasi masih relatif parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar subsector air limbah, persampahan, dan drainase;
- b) Koordinasi dan kinerja antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan sanitasi masih belum terpadu;
- c) Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait sanitasi masih relatif rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut;
- d) Keterbatasan anggaran dan investasi; sektor sanitasi masih belum menjadi skala prioritas;

- e) Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang layak;
- f) Partisipasi swasta masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.

Saat ini di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas air limbah terpusat (*off-site*), semuanya masih bersifat *on-site*. Sebagian besar penduduk kota menggunakan jamban pribadi, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum. Untuk pengangkutan air limbah menggunakan truk yang dikelola oleh Dinas Kebersihan bersama-sama dengan Perusahaan Daerah dan pihak swasta. Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk merupakan salah satu pemicu meningkatnya jumlah penderita diare, demam berdarah, dan malaria. Hal ini tentunya akan semakin membebani masyarakat, khususnya mereka yang tinggal pada perumahan yang padat dan tanpa sarana sanitasi yang memadai, dan mereka umumnya berpendapatan rendah. (Ramadhani, 2015:2)

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru. SSK merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sanitasi secara terpadu, menyeluruh, dan jangka panjang. SSK merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi kota, strategi, rencana tata ruang, dan program pembangunan peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi.

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi merupakan Rancangan Jangka Menengah (RPJM) dari Pemerintah Kota Pekanbaru . Strategi Sanitasi Kota

(SSK) Pekanbaru berisikan visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan sektor sanitasi (2010-2026) dan hal ini merupakan program Walikota Herman Abdullah dan dilanjutkan oleh Walikota Firdaus, ST, MT sampai saat ini masih diterapkan. Ruang lingkup SSK mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas pelayanan, pengembangan kelembagaan, penegakan hukum dan peraturan, pengembangan sistem pendanaan, peningkatan partisipasi masyarakat. (Ramadhani, 2015)

Daerah Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau yang sedang berkembang menjadi kota madani yang tingkat populasinya makin meningkat setiap harinya, yang menambah kebutuhan air bersih disetiap pemukiman rumah. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk konsumsi rumah tangga diantaranya untuk minum, masak, cuci, dan mandi. Kebutuhan air paling dominan digunakan untuk mandi dan cuci sehingga volume air untuk memenuhi kebutuhan tersebut terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola hidup manusia yang semakin bervariasi termasuk masyarakat kota Pekanbaru.

Penanganan air limbah yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum sampai pada tahap pemikiran proses penanganan atau menggunakan ulang limbah tersebut. Penanganan limbah selama ini hanya dilakukan dengan cara kuratif, yaitu dengan mengelola air limbah yang dibuang ke lingkungan. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi

masalah pencemaran air limbah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengadakan program pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang nantinya dapat bermanfaat untuk melindungi perlindungan badan-badan air dari pencemaran air limbah rumah tangga, serta peningkatan kualitas dan estetika lingkungan . Kontrak pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru merupakan kegiatan multiyear tahun 2018-2020 dimana surat kontrak SC 1 dan 2 pengadaannya ditandatangani pada tanggal 1 November 2018 antara Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSLP) Provinsi Riau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pihak dari Hutama Karya dan Widya Karya yang nilai kontraknya SC 1 berjumlah Rp.203 Miliar dan SC 2 sebesar Rp.141 Miliar. Pengadaan IPAL dikota Pekanbaru yang dalam proses pembangunan dilakukan di daerah Sukajadi, dan selanjutnya akan dilakukan lagi pembangunan pada sector utara Kota Pekanbaru yakni daerah Tenayan Raya, dan Kecamatan Lima Puluh. Peneliti juga menemukan beberapa fenomena dilapangan yaitu:

1. Belum optimalnya sosialisasi yang dilakakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengadaan IPAL sehingga masyarakat kurang memahami apa yang diamksud dengan IPAL dan pentingnya pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru;

2. Pengadaan IPAL yang terhambat pengerjaannya dikarenakan pandemic *Covid-19* yang seharusnya dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2020 sehingga berdampak makin lamanya waktu yang dibutuhkan agar program tersebut dapat berjalan secara fungsional;
3. Pengadaan IPAL memberikan dampak kemacetan dan berlumpur di beberapa ruas jalan yang meresahkan masyarakat yang memungkinkan dapat terjadi kecelakaan yang membahayakan keselamatan masyarakat sehingga dalam pengerjaan pembangunan tetap harus menerapkan kebersihan dan mengutamakan keamanan pengguna jalan.

Dari fenomena di atas yang sesuai dengan fakta empiris di lapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian skripsi dengan judul penelitian Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang di kemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah **Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) dalam rangka meningkatkan sanitasi di Kota Pekanbaru ?**

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan bagi pembaca secara umum mengenai efektivitas kebijakan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka meningkatkan sanitasi di Kota Pekanbaru.

#### b. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian pembangunan IPAL dalam meningkatkan sanitasi di masyarakat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan dengan teori efektivitas kebijakan dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran.

#### c. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembangunan sarana sanitasi melalui suatu rencana strategis, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi sanitasi lingkungan dan kesehatan.
- 2) Bagi institusi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bekal bagi Universitas Islam Riau dan mahasiswa khususnya yang mengambil

jurusan ilmu pemerintahan untuk memahami pentingnya pengembangan IPAL.

- 3) Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi tentang pentingnya pembangunan IPAL sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana masyarakat dapat menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini menjadi permasalahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. STUDI KEPUSTAKAAN

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Secara *etimologi* pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:  
(Syafiie:2015)

- 1) Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari 2 aspek yaitu rakyat dan pemerintah, yang keduanya saling berhubungan satu sama lainnya
- 2) Setelah ditambah “pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus
- 3) Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya. Menurut Strong (dalam Syafiie, 2015) menjelaskan bahwa



pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara.

Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Menurut Ndraha (2015) Pemerintah adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil. Tuntutan yang di perintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereign*, sebagai pelanggan, *consumer*, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Baik pemerintah maupun yang diperintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal-balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal ini yang membentuk hubungan dalam pemerintahan.

Menurut Apter ( dalam Syafiie, 2015) pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan pelaksanaan. Sedangkan Menurut Syafiie (2015) menjelaskan bahwa pemerintah ialah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan

sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat dicapai.

Menurut Humes IV ( dalam Nurcholis : 2011 ) hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditentukan dalam sistem pengawasannya. Berdasarkan sistem pengawasan inilah terbentuk tata hubungan pemerintahan dalam suatu negara. Humes IV menjelaskan bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah didasarkan pada dua dimensi: (a) control hierarchy, pengawasan hirarki dan (b) functional control, pengawasan fungsional.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Pemerintahan Daerah Pemerintah daerah adalah subdivisi pemerintahan nasional. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah langsung di bawah pemerintah pusat, sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah di bawah negara bagian. Dalam negara kesatuan pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat terhadap pemerintah pusat sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah adalah dependent dan subordinat terhadap negara bagian (Hoessein dalam Nurcholis : 2011). Oleh karena itu, dalam negara kesatuan dan negara koalisi, pemerintahan daerah tidak

dapat dipisahkan sepenuhnya dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintah daerah hanya merupakan bagian atau subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan pusat, maka terdapat hubungan antarpemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga membentuk satu kesatuan pemerintah pusat.

Jika demikian, maka dalam pemerintah pusat terdapat dua subsistem: (a) subsistem pemerintah pusat dan (b) subsistem pemerintah daerah. Dalam subsistem pemerintahan daerah terdapat subsistem pemerintahan daerah yang lebih kecil. Misalnya di Indonesia ada subsistem pemerintah pusat yang terdiri dari seorang presiden dan menteri. Sub sistem dan / atau sub sistem pemerintahan merupakan sistem pemerintahan nasional yang merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional.

Untuk dapat membentuk jalinan hubungan pemerintahan yang sistemik dengan hasil guna yang maksimal, setiap negara mengembangkan hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan. Pada tingkat nasional diatur hubungan antarlembaga tinggi negara dan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di daerah diatur hubungan antar lembaga daerah dan hubungan antar pemerintah daerah. Tata kerja dan mekanisme hubungan antar pemerintahan demikian diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil

dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat. (Nurcholis:2011)

## 2. Konsep Efektivitas Kebijakan

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas kebijakan program merupakan langkah yang penting dalam suatu implementasi program yang akan diadakan.

Teori Efektivitas menurut Gibson (dalam Pangulu 2013:4) memiliki beberapa tolak ukur dalam penilaiannya yaitu :

- 1) Produksi, adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- 2) Efisiensi, adalah merupakan perbandingan (*ratio*) antara *output* dengan *input*.
- 3) Kepuasan, adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Keunggulan, adalah tingkat dimana keorganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.

5) Pengembangan, adalah mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Variabel isi kebijakan ini digunakan untuk melihat apakah kebijakan ini sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan lingkungan, dan mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut sudah sesuai dengan hasil yang ada, setelah adanya kebijakan apakah memberikan dampak terhadap pembuat kebijakan serta masyarakat itu sendiri dan adanya perubahan yang spesifik dalam sanitasi lingkungan dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson ( dalam Handyaningrat, 1994) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Bastian (dalam Asnawi, 2013) efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109). Menurut Gibson dkk (dalam Kharsima dkk, 2017) efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.

Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Menurut Gibson (dalam Kharsima dkk, 2017) Gibson memandang konsep keefektifan organisasi dari tiga prepektif, yaitu keefektifan individu, keefektifan kelompok dan keefektifan organisasi.

1. Efektivitas Individu. Pada prespektif ini menekankan pada pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab individu sebagai pekerja dari suatu organisasi. Keberhasilan prestasi individu sangat berkaitan dengan kerja dalam kelompok karena individu bekerja dalam suatu organisasi pasti berhubungan langsung dengan kelompok.
2. Efektivitas Kelompok. Prespektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Dalam konteks ini, dimana ada suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan perorangan.
3. Efektivitas Organisasi. Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat ( dalam Setiawan, 2014) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Proses perencanaan kegiatan dapat dievaluasi melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu tidaknya perubahan besar dalam bentuk dan pengelolaan rencana kegiatan. Dalam hal ini, efektivitas mengacu pada penggunaan sumber daya secara efektif dalam hal masukan, proses, dan keluaran untuk mencapai tujuan rencana. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan personel, sarana dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Jika suatu rencana kegiatan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur dianggap efektif; dan apabila kegiatan dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat maka rencana kegiatan tersebut dianggap efektif.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ulum, 2004)

Adapun kreteria atau tolak ukur untuk pencapaian efektivitas menurut Siagian ( dalam Desrianti : 2019 ) yaitu :

- 1) Tujuan yang jelas, orang yang diberikan tugas dari atasan harus melaksanakan tugas yang diberikan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
- 2) Strategi pencapaian tujuan, langkah- langkah untuk mencapai tujuan harus jelas, agar dalam pelaksanaan suatu program sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan
- 3) Menganalisis dan merumuskan kebijakan, kebijakan dari suatu program harus dirumuskan dengan baik sesuai dengan strategi yang telah direncanakan agar tujuan dari organisasi tercapai
- 4) Perencanaan yang baik, merencanakan suatu program dengan baik sesuai dengan strategi yang telah direncanakan
- 5) Penyusunan program, menyusun program-program yang baik yang mana program tersebut dijadikan pedoman dalam bertindak dan bekerja
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana, suatu organisasi harus menyediakan sarana dan prasarana kerja untuk karyawan agar mereka bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, suatu program yang dilaksanakan harus secara efektif dan efisien agar tujuan dari suatu organisasi tercapai sesuai dengan yang diharapkan
- 8) Pengawasan dan pengendalian yang mendidik, ini sangat diperlukan karena kalau tidak ada pengawasan dan pengendalian maka para karyawan akan bertindak sesuka hatinya.



### 3. Konsep Kebijakan Publik

Segala sesuatu di dunia ini tidak lepas dari kebijakan publik, karena semuanya diatur dan diwujudkan melalui kebijakan. Perlu ditekankan bahwa kebijakan ini dilaksanakan oleh beberapa aktor berpengaruh, dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum. Mulailah dengan kebijakan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, dll. Dengan merumuskan keputusan kebijakan publik, kebijakan publik akan berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, akan ada banyak orang yang terlibat di semua tingkatan proses.

Menurut Dye (dalam Nafi'ah, 2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano (dalam Nafi'ah, 2015) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus

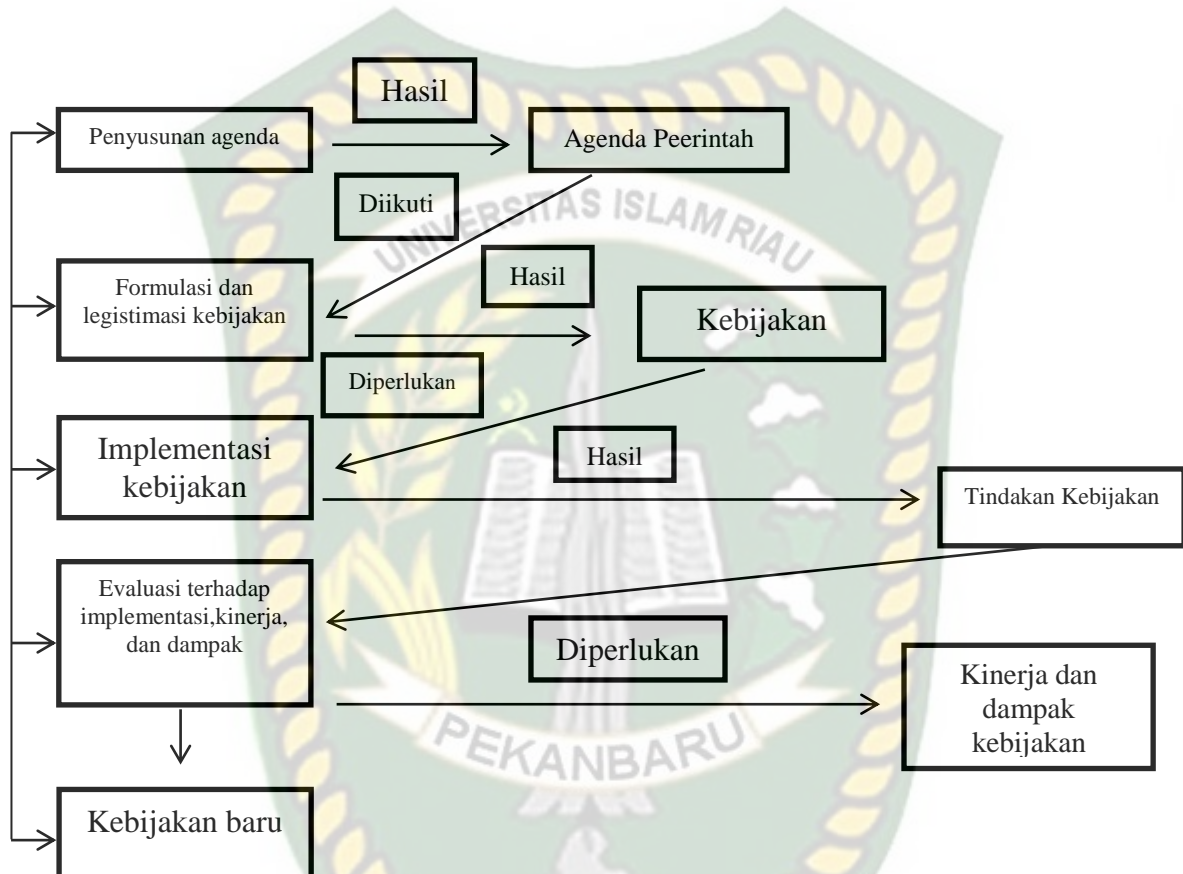
oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini sangat kompleks. Hal ini dikarenakan perilaku masyarakat dalam tatanan sosial yang semakin beragam, ditambah dengan perkembangan berbagai bidang, sehingga tidak menutup kemungkinan meningkatnya permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada perlu diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah secara tepat waktu, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan selanjutnya.

Karenanya, kehidupan saat ini akan selalu menghadapi kebijakan publik. Mengenai kebijakan publik, beberapa orang memiliki definisi sendiri-sendiri. Menurut Friedrich (dalam Saputri, 2018) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Namun definisi ini mendapat kritik dari berbagai tokoh, yang menekankan pada arah tindakan yang diusulkan, dan definisi kebijakan publik tidak terbatas pada apa yang diusulkan, tetapi juga mencakup apa yang sebenarnya dilakukan. Ditekankan bahwa definisi kebijakan dari konten yang diusulkan kurang tepat, karena nantinya kebijakan tersebut juga akan mencakup tahapan implementasi dan evaluasi.

Adapun tahapan kebijakan publik tersebut menurut Ripley (dalam Taufiqurokhman, 2014) dapat digambarkan melalui bagan di bawah ini :

**Gambar 2.1 Tentang Tahapan Kebijakan Publik**



Sumber : Ripley, 1985 ( dalam Saputri, 2018)

Sebagaimana diketahui bersama, kebijakan seringkali menemui kendala dalam proses pengadaan, bahkan masalah tersebut tergolong masalah yang kompleks. Di sisi lain, karena adanya kepentingan kelompok atau partisipan kebijakan itu sendiri, pengadaan program juga menghadapi tantangan. Dalam hal ini, ada enam jenis strategi yang dapat menimbulkan masalah, antara lain:

1. Kebijakan-kebijakan baru

Karena beberapa alasan, kebijakan baru tersebut sulit diterapkan. Pertama, belum ada saluran komunikasi baru yang dibuat, sehingga sulit untuk melakukan koordinasi. Kedua, tujuan yang ditetapkan seringkali tidak jelas. Ketiga, instruksi implementasi tidak konsisten. Keempat, sumber daya seperti sumber daya manusia dan fasilitas langka. Ini karena informasi tentang bagaimana menerapkan prosedur baru untuk mencapai tujuannya tidak mudah diperoleh. Demikian pula, mungkin tidak ada cukup staf untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Selain itu, prosedur baru seringkali kekurangan personel yang terampil. Badan-badan yang ada sering kali memikul terlalu banyak tanggung jawab perencanaan baru karena peningkatan staf. Kelima, kebijakan baru biasanya menyesuaikan dengan SOP lama, dan SOP lama tersebut tidak sesuai untuk diterapkan dalam kebijakan baru. Dengan demikian, faktor penyebab utama kegagalan implementasi tipe kebijakan baru adalah karena belum dipenuhinya syarat-syarat bagi implementasi kebijakan yang efektif. Model implementasi kebijakan mana pun akan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan syarat-syarat tertentu untuk berhasil.

## 2. Kebijakan yang didesentralisasikan

Implementasi yang terdesentralisasi berarti banyak orang yang terlibat. Kebijakan yang termasuk dalam kategori ini antara lain penegakan hukum, hak sipil, perlindungan konsumen, bantuan pendidikan pemerintah, dan perlindungan lingkungan. Semakin banyak pelaksana berpartisipasi, semakin besar pula pengawasan dari pelaksana tersebut. Namun, informasi tentang pekerjaan pelaksana seringkali kurang. Pada akhirnya hal ini akan menghambat proses

monitoring yang akan dilakukan. Di satu sisi, jumlah eksekutif yang banyak akan berpotensi menjadi sumber implementasi kebijakan, namun di sisi lain akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan.

### 3. Kebijakan kontroversial

Kebijakan kontroversial sering kali melibatkan banyak kepentingan yang berbeda. Sasaran kebijakan yang ingin dicapai harus mencerminkan tujuan aliansi supporter. Pada saat yang sama, ambiguitas dalam kebijakan tersebut akan mendorong legislatif untuk menghindari tanggung jawab dengan membiarkan eksekutif atau komite pengawas dikritik dalam keadaan tertentu ketika undang-undang tersebut diterapkan. Selain itu, kebijakan yang kontroversial seringkali mendorong pihak-pihak terkait untuk mempengaruhi pelaksana sehingga arah kebijakan menjadi tidak konsisten.

### 4. Kebijakan-kebijakan yang kompleks

Kebijakan kompleks biasanya memiliki banyak tujuan, dan karena tujuan tersebut sangat kompleks, pengambil keputusan tingkat tinggi sering tidak tahu bagaimana mendefinisikannya secara rinci. Akibatnya, undang-undang terkait kebijakan cenderung kabur. Selain itu, pedoman pelaksanaan yang terlalu ketat juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan, karena pedoman yang ketat akan menghambat kreativitas atau inisiatif pelaksana.

### 5. Kebijakan yang krisis

Contoh umum dari kebijakan tersebut adalah kebijakan dengan negara lain atau negara yang berkonflik. Pesan diplomatik yang dikirim antar negara musuh seringkali tidak jelas dan sulit dijelaskan. Selain itu, tidak ada sumber atau

peralatan yang rusak. Situasi krisis biasanya membutuhkan tindakan yang cepat dan fleksibel, dan tindakan restriktif tidak disarankan. Di sisi lain, kebiasaan yang selama ini digunakan tidak mudah untuk diubah. Hal ini akan menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

#### 6. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan

Keputusan pengadilan yang berwenang biasanya berbentuk ketidakjelasan. Selain itu, putusan pengadilan tampaknya tidak konsisten, karena hakim tidak secara eksplisit mengabaikan putusan yang lalu.

Dalam studi ini, kebijakan pembangunan instalasi pengolahan limbah masyarakat merupakan kebijakan krisis. Kuncinya, kebijakan adalah kebijakan yang mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka untuk mengubahnya harus membangun kepercayaan dan sikap yang baik dengan masyarakat, karena jika demikian maka masyarakat dapat mengabaikan kebijakan tersebut. Tidak diimplementasikan dengan benar. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi stagnasi kebijakan, dan akan menyulitkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat beberapa upaya untuk mendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik yakni, Pertama, memahami hambatan yang timbul serta alasan yang melatar belakanginya. Kedua, menemukan dan mengaplikasikan jalan keluar dari faktor penghambat tersebut serta. Misalnya, kurangnya kemampuan anggota legislatif dapat diatasi melalui pendidikan, workshop maupun training. Kurangnya saluran-saluran komunikasi yang efektif diatasi dengan penciptaan saluran-saluran baru yang lebih efektif dan lain sebagainya. Dengan demikian, masalah implementasi kebijakan dapat diatasi dengan cara

pengenalan terhadap masalah yang timbul beserta latar belakang yang melingkupinya, baru dibuat usulan-usulan untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi penyebabnya.

#### **4. Konsep Pembangunan IPAL**

##### **a. Pembangunan IPAL**

Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi. Sedangkan pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dalam IPAL ini terdapat tangki pembusukan yang merupakan sarana paling bermanfaat dan memuaskan diantara unit sarana pembuangan tinja dan limbah cair yang lain yang menggunakan system aliran air, yang digunakan untuk menangkap buangan dari rumah perorangan, kelompok rumah kecil, atau kantor yang terletak di luar jangkauan system saluran limbah cair. Adapun bagian yang lain yaitu bak kontrol, bak pengendap (settler), bak Anaerobic Baffled Reactor (ABR), dan bak Anaerobic Filter atau Biofilter (Rahmawati, 2014)

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal adalah Seperangkat peralatan dan perlengkapan teknis untuk mengolah air limbah yang dihasilkan oleh berbagai bentuk kegiatan di kawasan permukiman yang dapat menampung banyak rumah. Dalam buku Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kesehatan Lingkungan Permukiman juga menjelaskan sistem air limbah kala

permukiman dapat diartikan sebagai sebuah sistem pelayanan sanitasi yang melayani sekelompok rumah tangga, memiliki jaringan pipa, dan unit pengolahan air limbah ( dalam Iskandar dkk, 2016). Dalam pengelolaan IPAL sendiri biasanya melibatkan masyarakat, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan. IPAL Komunal sangat bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya, antara lain :

- 1) Mengolah air limbah domestik agar sumber air di sekitarnya dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan.
- 2) Mencegah pencemaran air sungai.
- 3) Menjaga kehidupan biota-biota sungai.

Adapun tujuan IPAL yaitu untuk menyaring dan membersihkan air yang sudah tercemar dari domestik. Selain itu, pembangunan IPAL Komunal ditujukan untuk memperbaiki sanitasi di suatu permukiman. Hal tersebut dikarenakan Sanitasi merupakan hak asasi manusia yang harus didapatkan karena menyangkut kesehatan manusia itu sendiri di samping terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Fasilitas pengolahan air limbah skala permukiman dapat menampung air limbah dari kamar mandi, toilet, dan dapur. Air limbah mengalir ke kotak kendali melalui pipa dan mengalir keluar dari kotak kendali, dan air limbah mengalir ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) melalui pipa.

Bak kontrol sangat penting dalam sistem sanitasi perpipaan. Bak kontrol berfungsi sebagai tempat memantau kondisi aliran air limbah dalam perpipaan. Sampah yang terbawa dari dalam rumah tertahan di dalamnya dan dapat diangkat supaya tidak masuk ke dalam sistem perpipaan yang dapat menyumbat aliran. Air



limbah yang ditampung dalam IPAL selama beberapa hari, akan mengalami penguraian secara biologis, sehingga kualitas air buangnya (effluent) sudah memenuhi standar yang aman dibuang ke saluran drainase atau badan air terdekat. (Iskandar dkk,2016)

Adapun parameter penentu system air limbah skala permukiman ialah berdasarkan rencana tata ruang, kepadatan penduduk, dan topografi. Secara ringkas yaitu :

- 1) Rencana jangka panjang dan menengah wilayah / kota (RTWW / Renstra / Master Plan), yang akan mengintegrasikan arah pembangunan perkotaan dengan rencana untuk mendukung infrastruktur (termasuk layanan air limbah domestik). Kepadatan penduduk: kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi akan menjadi kawasan prioritas untuk limbah perpipaan sistem air. Di daerah ini efisiensi biaya konstruksi / perumahan akan lebih baik, masalah sanitasi biasanya akan lebih banyak, dan kemungkinan pencemaran air tanah akibat personal hygiene akan lebih besar.;
- 2) Topografi: Topografi akan menentukan sistem pembuangan air limbah, apakah itu gaya gravitasi, pemompaan atau kombinasi keduanya. Pilihan ini akan mempengaruhi biaya konstruksi serta biaya pengoperasian dan pemeliharaan. Prioritas tertinggi adalah biaya operasi dan pemeliharaan termurah, yaitu area yang dapat dilayani oleh sistem gravitasi;
- 3) Ketersediaan pelayanan air minum: Persyaratan mutlak dari wilayah pelayanan air limbah perpipaan adalah tersedianya air minum secara kontinyu.

Penentuan jalur pipa Air limbah dialirkan secara gravitasi dengan aliran terbuka. Artinya pipa tidak akan pernah penuh dengan air limbah, sehingga harus dipastikan bahwa tidak ada kenaikan dasar pipa pada semua jalurnya. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal:

- 1) Pada prinsipnya pipa dipasang pada jalur yang dapat melayani sebanyak mungkin rumah tangga;
- 2) Diusahakan agar aliran bisa berjalan secara gravitasi, sehingga jalur pipa dari hulu ke hilir harus melalui jalan yang menurun;
- 3) Jalur pipa mengikuti jalan umum milik pemerintah dengan memperhatikan hirarki jalan.

Oleh karena itu, manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sehingga dapat menjalani kehidupan yang baik. Saat ini banyak terdapat permasalahan pada permukiman, salah satunya adalah kondisi sanitasi yang sulit diperoleh, sehingga kondisi sanitasi dapat merusak unsur hayati dan non hayati pada ekosistem. Sanitasi merupakan salah satu komponen kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan merupakan perilaku terencana yang dapat mewujudkan hidup bersih dan sehat, melindungi manusia dari kontak langsung dengan debu dan limbah berbahaya lainnya, sehingga menjaga kesehatan manusia di masa depan. Limbah tersebut dapat berupa kotoran manusia atau hewan, limbah padat, limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian.

Untuk menjaga kebersihan, teknologi seperti septic tank dan utilitas umum dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Sanitasi lingkungan dalam hal ini

merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan manusia, karena sanitasi lingkungan yang baik mempengaruhi sumber daya manusia, yang pada akhirnya membantu mewujudkan potensi manusia secara maksimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas di masa yang akan datang. Dalam membangun instalasi pengolahan limbah masyarakat, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pasalnya, tanpa dukungan masyarakat, kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat akan memastikan perkembangan dan perubahan, dan kesadaran harus ditingkatkan terlebih dahulu.

b. Tahapan Pengolahan Air limbah pada IPAL Komunal

Ada lima tahapan yang perlu dilalui dalam pengolahan air limbah yakni sebagai berikut :

- 1) Air limbah dibuang ke lokasi instalasi. Dalam hal ini, terdapat perangkat yang dilengkapi dengan ruang drainase untuk memungkinkan air limbah masuk ke area filter dengan lancar.
- 2) Air limbah tersebut akan melalui proses pertama yaitu penampung air dan pasir. Tujuannya adalah untuk menyimpan partikel kotor ke dalam air limbah. Partikel kotor kemudian diendapkan oleh partikel karbon kecil yang tertampung di pasir, sehingga partikel kotor tersebut masuk ke dalam air limbah.
- 3) Air limbah yang disaring melalui wadah penyimpanan pasir akan dikirim ke wadah yang berisi kerikil. Fungsinya hampir sama pada container sebelumnya,

pada container sebelumnya partikel-partikel yang belum berhasil diendapkan oleh pasir akan diolah dengan container yang diisi kerikil.

- 4) Air limbah akan masuk ke dalam wadah dengan eceng gondok yang ukurannya lebih besar dari dua wadah pertama, karena dalam proses ini dibutuhkan tanaman eceng gondok dalam jumlah besar untuk menetralkan air limbah yang berfungsi menyaring dan menjernihkan air kotor. partikel. Karena tumbuhan memiliki sifat kimiawi, seperti penyerap amonia dan fosfat.
- 5) Tahap terakhir adalah tahap eksperimen, dimana ikan dimasukkan ke dalam wadah untuk mengetahui seberapa bersih air limbah yang disaring.

Dari tahap tersebut dapat disimpulkan bahwa jika air tersebut hidup dalam proses penyaringan, maka air tersebut dapat dikatakan bersih, begitupun sebaliknya.

#### c. Jenis Pengolahan IPAL Komunal

Terdapat dua jenis sistem pengolahan IPAL Komunal yakni :

- a) Sistem anaerob Sistem ini menggunakan mikroorganisme alami untuk penguraiannya, sehingga tidak ada masalah teknis. Kegiatan pengelolaan IPAL dibatasi untuk menjaga agar jaringan pipa domestik tidak terhalang. Kemudian bersihkan pipa untuk menjaga kelancaran operasi. Jika pipa rusak atau bocor, maka akan diperbaiki.
- b) Sistem aerobik Sistem ini menggunakan peralatan mekanis di unit pemrosesan, seperti blower atau aerator, yang dapat dikelola oleh operator terlatih.

#### d. Komponen konstruksi IPAL komunal

- 1) Pemukiman Padat

Rumah adalah tempat untuk tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Definisi ini membawa banyak konsekuensi yakni bahwa selain kualitas rumah yang harus baik, diperlukan pula segala fasilitas yang dibutuhkan tumbuh dan berkembang.

## 2) Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain ( Notoatmodjo, 2005 ).

## 3) Konstruksi

Pengertian "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal (Trianto, 2011:1).

### e. Pemilihan lokasi IPAL komunal

Penetapan lokasi pembangunan konstruksi IPAL komunal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

#### 1) Daftar panjang/longlist

Pemilihan lokasi dimulai dengan penetapan calon lokasi penerima DAK SLBM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk daftar panjang ( *longlist* ) Kelurahan.

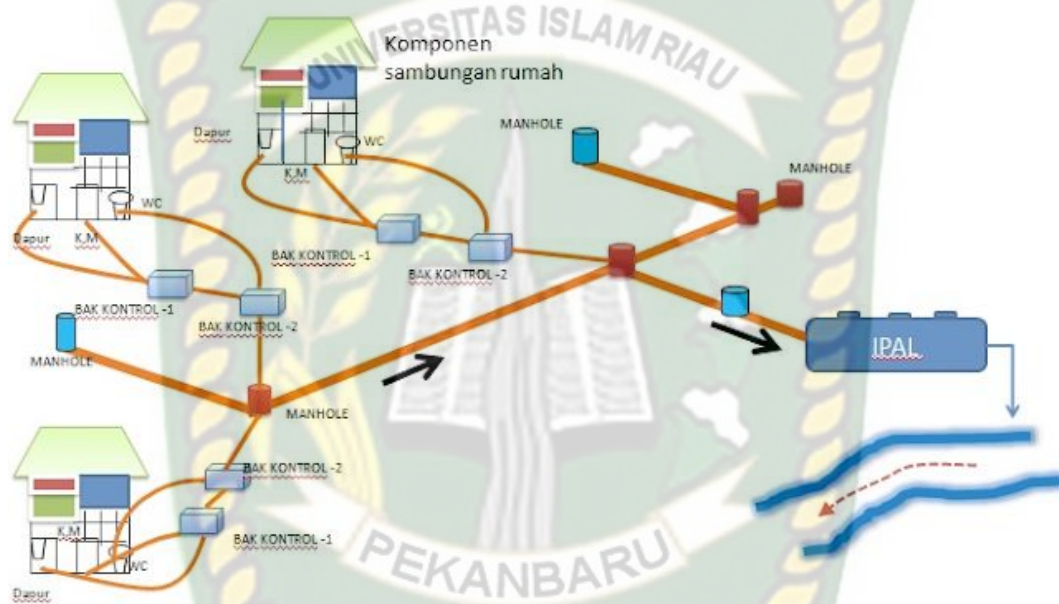
#### 2) Daftar pendek /shortlist

Daftar pendek merupakan data primer yang ditentukan berdasarkan hasil survei dan identifikasi daftar panjang ( *longlist* ) yang dilakukan oleh TFL dan dinas

penanggung jawab kegiatan DAK SLBM berdasarkan kriteria kelayakan maksimal.

### 3) Skema Tahapan Pengelolaan Air limbah Rumah Tangga / Domestik

**Gambar II. 2 Skema Tahapan Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga / Domestik**



Sumber: <https://www.yuanblower.xyz/2019/07/pengolahan-air-limbah-domestik.html>

#### 1. Tahap Utama

- a) Ini adalah tahap pertama dari pengolahan air limbah / air limbah yang menghilangkan sekitar 40-60% dari padatan tersuspensi.
- b) Ini melibatkan penyaringan untuk menghilangkan benda-benda besar seperti tongkat, batu dll yang dapat menyebabkan kerusakan pada lubang masuk tangki.

- c) Itu menggunakan ruang pasir yang memperlambat aliran air limbah untuk memungkinkan pasir jatuh secara alami ke bagian bawah tangki di mana ia bisa dihilangkan.
- d) Klarifikasi primer atau tangki pengendapan / sedimentasi pada tahap ini menghilangkan kontaminan yang tenggelam dan mengambang.
- e) Air limbah yang diolah sebagian dari tangki primer kemudian mengalir ke sistem pengolahan sekunder.

## 2. Tahap Sekunder

- a) Ini adalah tahap di mana pengobatan biologis (aerob / anaerob) air limbah dari tahap primer dimulai dan menghilangkan hingga 90% bahan organik.
- b) Ini menggunakan proses lumpur aktif yang menggunakan oksigen terlarut untuk meningkatkan pertumbuhan flok biologis yang secara substansial menghilangkan bahan organik.
- c) "Lumpur aktif" yang mengandung bakteri terus disirkulasikan kembali ke tangki aerasi untuk meningkatkan laju dekomposisi organik.
- d) Bakteri menyerang padatan tersuspensi yang terlarut dan terbagi halus yang tidak dihilangkan oleh sedimentasi primer.
- e) Air kemudian dibawa ke tangki pengendapan di mana endapan kembali mengendap, meninggalkan air 90 hingga 95% bebas dari polutan.

## 3. Tahap Tersier

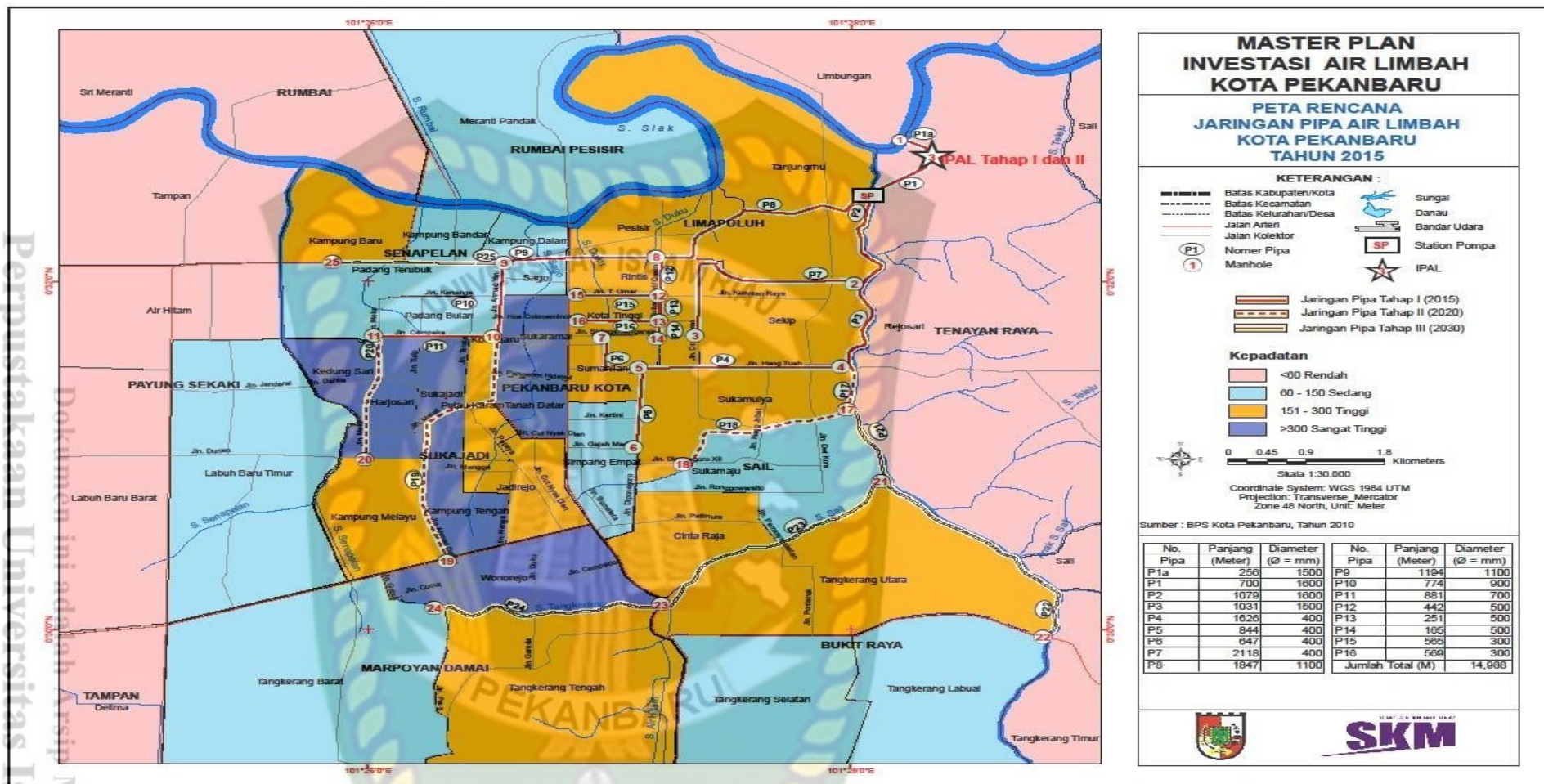
- a) Ketika efluen dari perawatan sekunder tidak dapat diterima, perawatan tingkat ketiga yang disebut perawatan tersier atau lanjutan, dapat digunakan.

- b) Tujuannya adalah untuk menyediakan tahap perawatan akhir untuk meningkatkan kualitas limbah ke tingkat yang diinginkan.
- c) Air limbah mencapai tahap tersier, masih mengandung zat tersuspensi dan partikel halus dan dibuang pada tahap ini.
- d) Air pada tahap ini hampir bebas dari zat-zat berbahaya dan bahan kimia dan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang atau dilepaskan kembali ke lingkungan.
- e) Tahap ini juga disebut sebagai tahap desinfeksi dan UV adalah desinfektan yang ideal untuk air limbah karena tidak mengubah kualitas air.

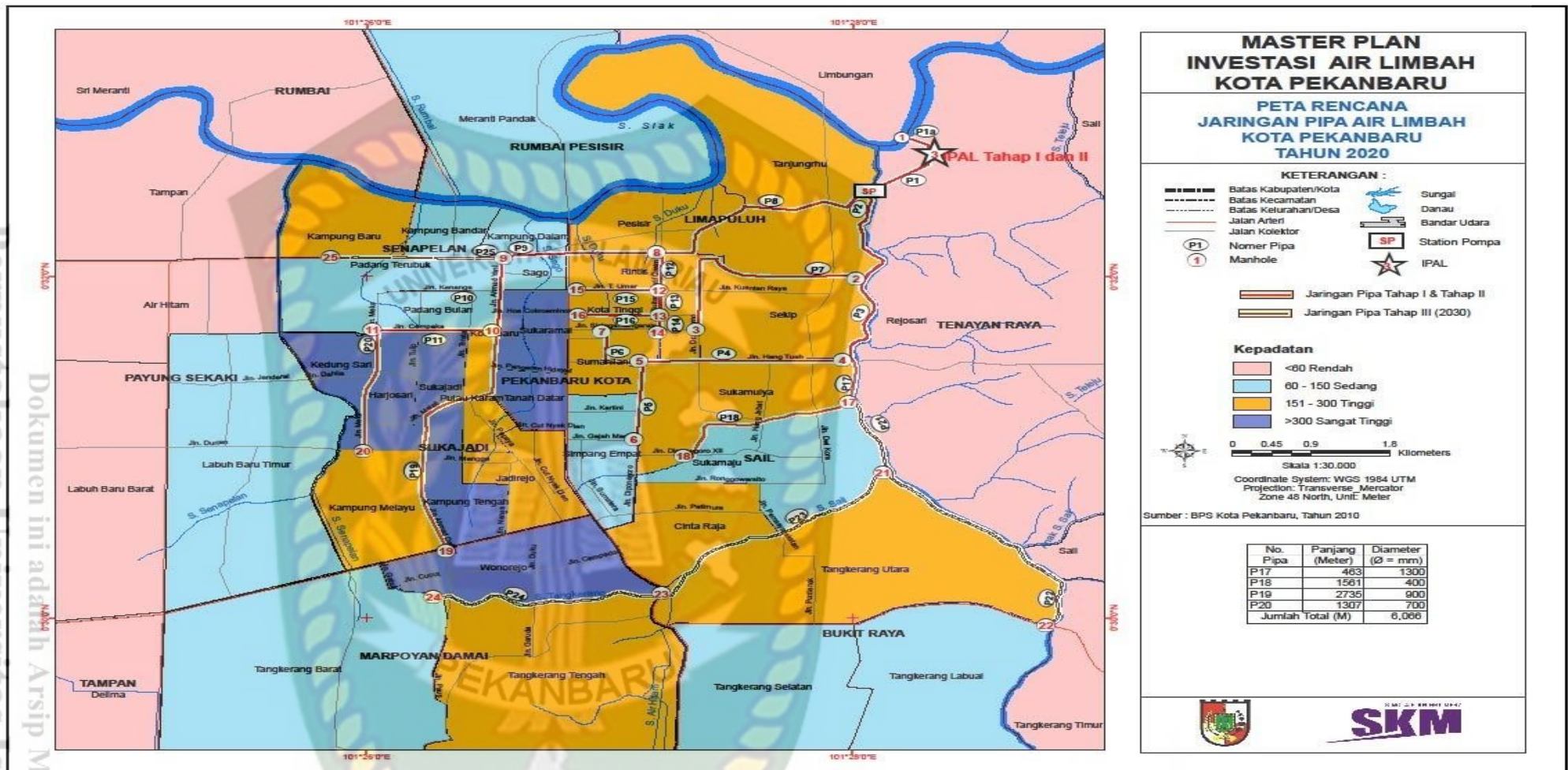
Adapun Master Plan Pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:



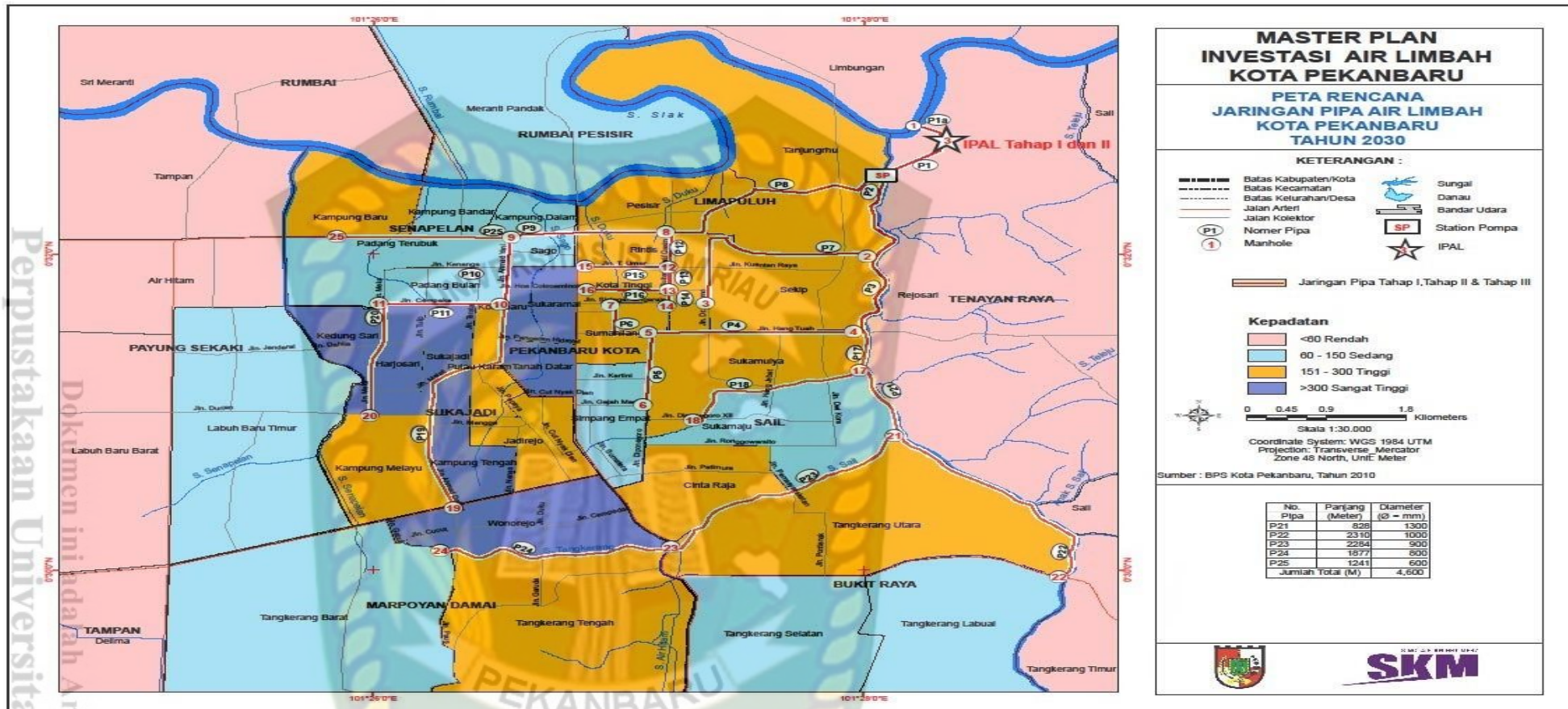
Gambar II. 3 Perencanaan Jaringan Saluran pembuangan Air Limbah Kota Pekanbaru tahun 2015



Gambar II. 4 Perencanaan Jaringan Saluran pembuangan Air Limbah Kota Pekanbaru tahun 2020



Gambar II. 5 Perencanaan Jaringan Saluran pembuangan Air Limbah Kota Pekanbaru tahun 2030



Sumber : Laporan Akhir Rencana Induk Investasi Air Limbah Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## 5. Konsep Sanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan (Rejeki, 2015:2). Sanitasi Lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya ( Notoadmojo dalam Waluya, 2015). Untuk mengevaluasi sanitasi perkotaan, angka kematian bayi digunakan sebagai indikator umum, dan tingkat infeksi penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera, demam enterik dan disentri juga digunakan sebagai indikator yang dipengaruhi oleh kondisi sistem air (Otaki dkk : 2007). Pengertian Sanitasi lainnya adalah cara menyetatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahanbahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, dengan kata lain pengertian dari sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan (Rocket, 2017).

Sanitasi menurut World Health Organization (WHO) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Yula, 2006). Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk

meningkatkan dan mempertahankan standard kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup:

- 1) Pasokan air bersih dan aman;
- 2) Pembuangan limbah dari hewan, manusia, dan industri yang efisien;
- 3) Perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia;
- 4) Udara yang bersih dan aman;
- 5) Rumah yang bersih dan aman.

Dengan demikian, sanitasi merupakan usaha maupun tindakan dari seseorang terhadap lingkungan sekitarnya agar terkondisi bersih dan sehat. Lingkungan bersih dan sehat mengindikasikan terbebas dari suatu penyakit. Sehingga penciptaan lingkungan tersebut harus dilakukan sedemikian rupa dengan maksud mencegah timbulnya bakteri-bakteri penyebab penyakit yang dapat merugikan manusia.

## **6. Konsep Organisasi Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2015) Organisasi Pemerintahan adalah organisasi formal. Struktur organisasinya pun formal. Begitu sebuah organisasi formal dibentuk, di dalamnya secara spontan terbentuk pula organisasi informal. Menurut Syafiee (dalam Sari dkk,2018) Keorganisasian dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama
- 2) Bagaimana sifat sebuah bentuk kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama

- 3) Bagaimana sifat sebuah bentuk pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang
- 4) Bagaimana sifat sebuah bentuk system tentang aktifitas kerjasama dua orang/lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang buluh, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi

Berikut ini lima karakteristik organisasi pemerintah yang birokratis (Darmanto, 2006):

- 1) Pemerintahan diorganisasi secara birokratis Kegiatan yang menyangkut perencanaan dan pemikiran dipisahkan dari aspek pelaksanaan dimana fungsi pelaksanaan dibagi serta dikelompokkan menurut fungsi, yang dibagi lagi ke dalam unit yang lebih kecil. Unit dipisahkan ke dalam pekerjaan yang dirinci dalam tugas yang lebih khusus. Model kegiatan atau pekerjaan seperti ini sudah menjadi sesuatu yang rutin dan diterima secara meluas serta dianggap sebagai suatu keharusan, bukan lagi sekedar tanggapan terhadap suatu permasalahan yang muncul harus diselesaikan. Dampak dari fungsi pelaksanaan tersebut menyebabkan para pegawai terikat dalam mesin birokratis yang monoton, kaku, serta menjadi tidak kreatif dan tidak responsif.
- 2) Sistem penggajian organisasi pemerintah yang tidak memadai Selain jumlah PNS yang sangat besar, sistem penggajian PNS juga tersentralisasi sehingga beban Negara untuk membayar seluruh PNS sangat besar dan berat. Sampai sekarang negara kesulitan untuk menerapkan sistem gaji berdasarkan prestasi sehingga pegawai kurang tertantang dan tidak termotivasi untuk meningkatkan

kinerja. Dengan adanya otonomi daerah maka pemda sebenarnya dapat menerapkan sistem penggajian berdasarkan prestasi.

- 3) Organisasi pemerintah memiliki monopoli Pemerintah memiliki kekuasaan atas rakyatnya sehingga pemerintah juga mempunyai hak memonopoli sebagian atau semua bidang aktivitas yang ada di wilayahnya. Dengan monopoli tersebut maka pemerintah hanya mendapat tekanan pengaruh yang kecil dari masyarakat, pelanggan, atau pesaingnya. Monopoli biasanya bersifat negatif di mana hal tersebut dapat menyebabkan hampir tidak adanya konsekuensi apapun terhadap kinerja yang dilakukan sehingga mereka lebih memfokuskan perhatian ke dalam, pada diri mereka sendiri (inward looking).
- 4) Organisasi pemerintah bersifat non profit. Kegiatan pelayanan umumnya tidak dilakukan oleh organisasi swasta. Pegawai pemerintah lebih memperhatikan status birokratis, jabatan, kepangkatan, dan anggaran yang tersedia daripada harus memikirkan misi organisasi serta pencapaian hasil kerjanya. Pegawai negeri memperoleh gaji bukan karena prestasi kerja tapi karena lebih sekedar kepatasan yang diberikan pemerintah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pegawai. Jika pemerintah membayar kurang pantas disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.
- 5) Organisasi pemerintah diorganisasi dalam hirarki berlapis Dalam bidang kepegawaian maka aturan kepangkatan akan menentukan wewenang, jabatan, gaji, dan peluang karir. Pada bidang tersebut terdapat kelompok orang yang memberi perintah dan yang melaksanakan perintah. Semakin tinggi jabatan seseorang akan diikuti dengan semakin tingginya kewenangan memberi

perintah. Pegawai pemerintah cenderung takut melakukan pekerjaannya dan takut berbuat salah. Mereka terbiasa dalam lingkungan kerja yang menunggu perintah dari pimpinan. Jika mereka ingin mengubah sesuatu atau memiliki inisiatif dalam bekerja maka mereka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya. Dalam birokrasi pemerintah, seorang atasan pada umumnya kurang menginginkan bawahannya memiliki kreatifitas tinggi yang melebihi dirinya karena takut tersaingi. Dalam organisasi pemerintah, orang yang kurang pandai memungkinkan menduduki suatu jabatan dimana dia dapat memerintah bawahan yang mungkin lebih pandai karena faktor kedekatan dengan pimpinan.

## 7. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu tentang Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	2	3	4	5
1.	Yenny Dwi Artini, 2015	Implementasi Kebijakan Pengelolaan air Limbah Domestik Di Kota Yogyakarta Melalui Program sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (Studi	Penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik permasalahanan yaitu IPAL



		Kasus di Kawasan Bantaran Sungai Code		
2.	Jaka Purwanta,2013	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup di IPAL Sewon Kabupaten Bantul Melalui Kajian Biaya Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik permasalahan yaitu IPAL
3.	Azizatul Nafi'ah,2015	Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif Dalam Good Environmental Governance Di Kota Blitar	Penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi dan dilakukan di Kota Blitar sedangkan penelitian ini menggunakan teori efektivitas dan dilakukan di Kota Pekanbaru.	<p>a. Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam topik permasalahan yaitu IPAL</p> <p>b. Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan dalam metode penelitian yaitu kualitatif</p>
4.	Isra Junna dkk	Analisis Kontruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Untuk Daerah	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu membahas permasalahan limbah untuk daerah

		Padat Penduduk Di Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Sumbawa Besar	menggunakan metode kualitatif.	padat penduduk
5.	Yurina Otaki, dkk	Water Systems And Urban Sanitation : A Historical Comparison Of Tokyo And Singapore	Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu dan penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu membahas permasalahan sanitasi

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Dari keseluruhan riset sebelumnya belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik mengenai Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru sehingga riset ini menjadi sebuah riset yang baru dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **B. Kerangka Pikiran**

Kerangka pikiran bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci terkait variabel penelitian beserta indikator-indikator yang ada di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

**Gambar II.6. Kerangka Pemikiran Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi Di Kota Pekanbaru**



*Sumber : Modifikasi Penulis 2021*

### **C. Konsep Operasional**

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan adalah suatu tuntunan yang dianut di dalam suatu bangsa dan negara yang berhubungan dengan banyak bidang-bidang.
- 2) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai.

- 3) Kebijakan Publik adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas.
- 4) Pengadaan Perangkat Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah seperangkat peralatan teknis yang digunakan untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan berbagai bentuk kegiatan di permukiman. Mampu menampung banyak rumah untuk menangani kegiatan permukiman sampah yang bersumber dari Pencemaran lingkungan dan ekosistem. , lalu dibuang ke media lingkungan.
- 5) Kebersihan adalah suatu kesengajaan yang bertujuan untuk membina hidup bersih dan mencegah kontak langsung dengan bahan-bahan yang kotor dan berbahaya, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan manusia.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.2 Operasional Variabel Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Gibson (2001) "Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru	1.Produksi	a.Kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang padat penduduk  b.Kebijakan IPAL dikeluarkan bertujuan agar limbah domestic/limbah rumah tangga dapat diolah dengan

<p>dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan’’</p>		<p>semestinya sehingga masyarakat tidak terapar bakteri dari limbah</p>
	<p>2.Efesiensi</p>	<p>a.Pengadaan IPAL dapat berdampak positive bagi masyarakat khususnya dikawasan padat penduduk</p> <p>b.Dengan adanya kebijakan IPAL, kualitas air dan tanah akan lebih baik dari sebelumnya</p>
	<p>3.Kepuasan</p>	<p>a. Masyarakat merasa dengan adanya IPAL dapat membantu meningkatkan sanitasi permukimannya</p> <p>b. Pemerintah sebagai actor kebijakan IPAL sudah berhasil mewujudkan visi misi kebijakan yang seharusnya</p>

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dikarenakan permasalahan yang diambil adalah fenomena sosial yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2016). Pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif diharapkan mampu menjawab secara lebih terperinci mengenai gejala social yang dimaksud dalam suatu permasalahan penelitian yang bersangkutan (Malo dalam Harivarman,2017). Dalam hal ini penulis akan menggunakan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

- 1) Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas pelayanan berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.
- 2) Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini adalah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) Dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dengan alasan penulis melihat bahwa adanya permasalahan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menjalankan program pengadaan instalasi pengolahan air limbah ( IPAL ) di Kota Pekanbaru dan daerah yang ditetapkan dalam program IPAL bukan daerah kumuh padat penduduk yang sanitasinya tidak ada ruang tanah lagi dan airnya kotor, bukan juga daerah banjir atau wilayah tepi sungai dan bukan wilayah industri atau perhotelan mall.

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang cukup. Agar penelitian dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, dan mengetahui apakah cocok memberikan informasi sesuai dengan bidang yang ia tekuni, dan penulis juga perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

Adapun Informan dalam penelitian ini akan diambil dari Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan Key Informan ialah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dikarenakan terakit pembangunan di Kota Pekanbaru merupakan program dari pemerintah pusat yaitu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang ditawarkan kepada beberapa daerah di Indonesia dan Kota Pekanbaru terpilih sebagai salah satunya, maka setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyetujui untuk membangun IPAL tersebut, maka dimintalah persetujuan dari Walikota Pekanbaru, oleh karena itu serta masyarakat yang ada di sekitar pengadaan program tersebut.

Beberapa diantaranya adalah :

No	Jabatan	Jenis
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	Key Informan
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT IPAL Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru	Informan



3	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan B3 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Informan
4	Masyarakat yang bermukim disekitar pengadaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Informan
5	Masyarakat Pengguna Ruas Jalan Pengadaan IPAL	Informan

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah informasi tentang data yang dibutuhkan peneliti, dan sumber data berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

##### 1) Data primer

Data primer adalah suatu obyek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Peneliti menggunakan informan sebagai sumber data utama yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Pelapor yang dimaksud adalah pertama penanggung jawab atau staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanbaru, disusul penanggung jawab atau staf Dinas Lingkungan Hidup dan Sanitasi Kota Pekanbaru; kedua, ada beberapa orang yang tinggal di sekitar proses pengadaan pembangunan IPAL. Pemilihan objek informasi dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaian masalah penelitian dengan tanggung jawab dan fungsi instansi terkait, dan tentunya harus dibarengi dengan penguasaannya terhadap masalah penelitian.

##### 2) Data Sekunder

Bryman ( dalam Silalahi, 2009) mendefinisikan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber tersebut antara lain buku, dokumen atau publikasi resmi Pemerintah, arsip organisasi, jurnal, Peraturan Perundang-undangan, majalah, koran, dan situs internet yang berkaitan erat dengan topik peneliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Creswell (2016) Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi yaitu:

##### 1) Wawancara Kualitatif

Peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*Unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.

##### 2) Observasi Kualitatif

Yakni peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Para peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat *open-*

*ended* dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

### 3) Dokumentasi Kualitatif

Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen publik misalnya koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat seperti e-mail.

### 4) Audio Visual Kualitatif

Peneliti mengumpulkan data berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara atau bunyi. Dan juga mencakup kisah hidup, naratif visual metafora, dan arsip digital (Clandinin dalam Creswell, 2016)

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Data yang diolah menggunakan analisis secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan tentang bagaimana efektivitas kebijakan pengadaan instalasi pengolahan air limbah ( IPAL) dalam rangka meningkatkan sanitasi di kota pekanbaru.

### G. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel III.1 Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) dalam rangka meningkatkan sanitasi di Kota Pekanbaru.**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2020-2021							
		Agt 2020	Okt 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2020	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■						
2	Seminar Up		■						
3	Riset			■					
4	Penelitian lapangan				■				
5	Pengelolaan dan analisa data					■			
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi						■		
7	Ujian skripsi							■	
8	Revisi dan pengesahan skripsi								■
9	Penyerahan skripsi								■

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987, terdiri dari 8 wilayah kecamatan dari 5 kecamatan yang ada sebelumnya, dengan luas wilayah 446,5 Km<sup>2</sup>, setelah diadakan pengukuran dan pematokan oleh Badan Pertanahan Nasional Riau, luas Kota Pekanbaru selanjutnya di verifikasi menjadi 632,26 Km<sup>2</sup>. Dengan bergulirnya otonomi daerah pada tahun 2000 dan untuk terciptanya tertib pemerintahan serta pembinaan pada wilayah yang cukup luas ini, maka dibentuklah Kecamatan baru yang ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 sehingga menjadi 12 kecamatan. Demikian pula dengan Kelurahan/Desa dimekarkan menjadi 58 (dari 45 Kelurahan/Desa yang ada sebelumnya) berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003.

Letak Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Siak yang membelah kota menjadi beberapa wilayah. Kemudian mengambil Sungai Sikh sebagai acuan arah utara-selatan kota, wilayah di atas Sungai Sikh diidentifikasi sebagai wilayah utara perkotaan, dan sebaliknya, wilayah di bawah Sungai Sikh diidentifikasi sebagai wilayah perkotaan bagian selatan. Letak geografis Pekanbaru berada diantara 101014' – 101034' BT dan 0025' – 0045' LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan. Berikut adalah Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 83 kelurahan (dari total 166 kecamatan dan 268 kelurahan di seluruh Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 886.226 jiwa dengan luas wilayahnya 632,27 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 1.401 jiwa/km<sup>2</sup>. Daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.I : Daftar kecamatan dan desa/kelurahan di Kota Pekanbaru**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2.	Sail	3,26	0,52
3.	Sukajadi	3,76	0,59
4.	Lima Puluh	4,04	0,64
5.	Senapelan	6,65	1,05
6.	Bukit Raya	22,05	3,49
7.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8.	Payung Sekaki	43,24	6,84

1	2	3	4
9.	Tampan	59,81	9,46
10.	Rumbai	128,85	20,38
11.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
12.	Tenayan Raya	171,27	27,09
<b>Jumlah</b>		<b>632,26</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Buku RPI2JM Kota Pekanbaru*

Pada table diatas menunjukkan beberapa luas wilayah Kota Pekanbaru. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 171,27 Km<sup>2</sup>. Sedangkan yang memiliki wilayah yang paling kecil di Kota pekanbaru dimiliki oleh Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 2,26 Km<sup>2</sup>.

#### **B. Penduduk**

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2019 bersumber dari hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 954.373 jiwa, sedangkan berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru adalah 1.149.359 jiwa. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru.

**Tabel IV.2 : Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun 2018-2019 (%)
1	Tampan	181.910	6,24
2	Payung Sekaki	94.965	4,27

1	2	3	4
3	Bukit Raya	93.337	2,35
4	Marpoyan Damai	130.303	3,32
5	Tenayan Raya	136.448	5,24
6	Limapuluh	43.461	2,59
7	Sail	23.285	2,41
8	Pekanbaru Kota	26.645	3,14
9	Sukajadi	47.672	2,93
10	Senapelan	38.292	1,78
11	Rumbai	68.451	7,00
12	Rumbai Pesisir	69.604	2,73
	Hasil Registrasi	954.373	4,20
	Hasil Proyeksi	1.149.359	2,86

(Sumber : *Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020*)

Penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai 1.149.359 jiwa. Jumlah penduduk di dua belas kecamatan ini cukup beragam dengan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 181.910 jiwa, disusul dengan Kecamatan Marpoyan sebanyak 130.303 jiwa dan Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk 136.448 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terendah berada di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 23.285 jiwa, disusul dengan Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 26.645 jiwa dan Kecamatan Senapelan dengan jumlah penduduk 38.292.

### C. Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani.

Makna yang terkandung dalam visi Kota Pekanbaru adalah:

- 1) Kota Metropolitan, adalah Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai dengan konsep



pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan warga kota.

2) Madani, adalah Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa. Untuk mewujudkan Visi tersebut, sesuai dengan harapan terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka disusun Misi Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- b) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai;
- c) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota;
- d) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

- e) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

#### **D. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja, merupakan salah satu dari kantor dinas di kota Pekanbaru yang mengalami penggabungan. Adapun Visi dan Misi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu :

##### **1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru**

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 2021 ditetapkan sebagai berikut : “ Terwujudnya pemukiman yang layak, jalan, lingkungan yang sehat dan nyaman serta prasarana jalan dan prasarana pengairan yang handal”.

##### **2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru**

Sejalan dengan visi dinas pekerjaan umum Kota Pekanbaru, maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir
- b) Meningkatkan fungsi jaringan jalan dalam kota
- c) Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman
- d) Membantu pembangunan gedung-gedung, perumahan dan fasilitas pemerintah kota lainnya

- e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra kerja lingkup pekerjaan umum

Adapun tujuan yang akan di capai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru antara lain :

- a) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air guna mengamankan kawasan dan bahaya banjir, erosi, abrasi, dan pencemaran limbah padat dan cair.
- b) Meningkatkan kondisi ruas jalan kota
- c) Membangun prasarana jalan ke daerah potensial serta daerah berkembang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi
- d) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pada kawasan permukiman kumuh dan baru
- e) Mendorong terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah kota yang tertib dan fungsional
- f) Meningkatkan SDM aparat dalam penyelenggaraan pembangunan

Adapun sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Adalah :

- a) Berkurangnya kawasan banjir akibat tidak lancarnya saluran serta tertatanya sungai;
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan kota;
- c) Saluran drainase yang tidak mengalir berkurang;
- d) Meningkatnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana permukiman dikawasan kumuh;

- e) Terwujudnya struktur bangunan gedung pemerintahan yang berdaya tahan 25 tahun;
- f) Meningkatnya kualitas aparat pemerintah setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat structural maupun teknis

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum.
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
  - 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
  - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan Bina Marga.
  - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
  - 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
  - 3. Seksi Penataan Bangunan.

f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
2. Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi.
3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.

g. Bidang Tata Ruang, membawahi :

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
3. Sekesi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

h. Bidang Pertamanan, membawahi :

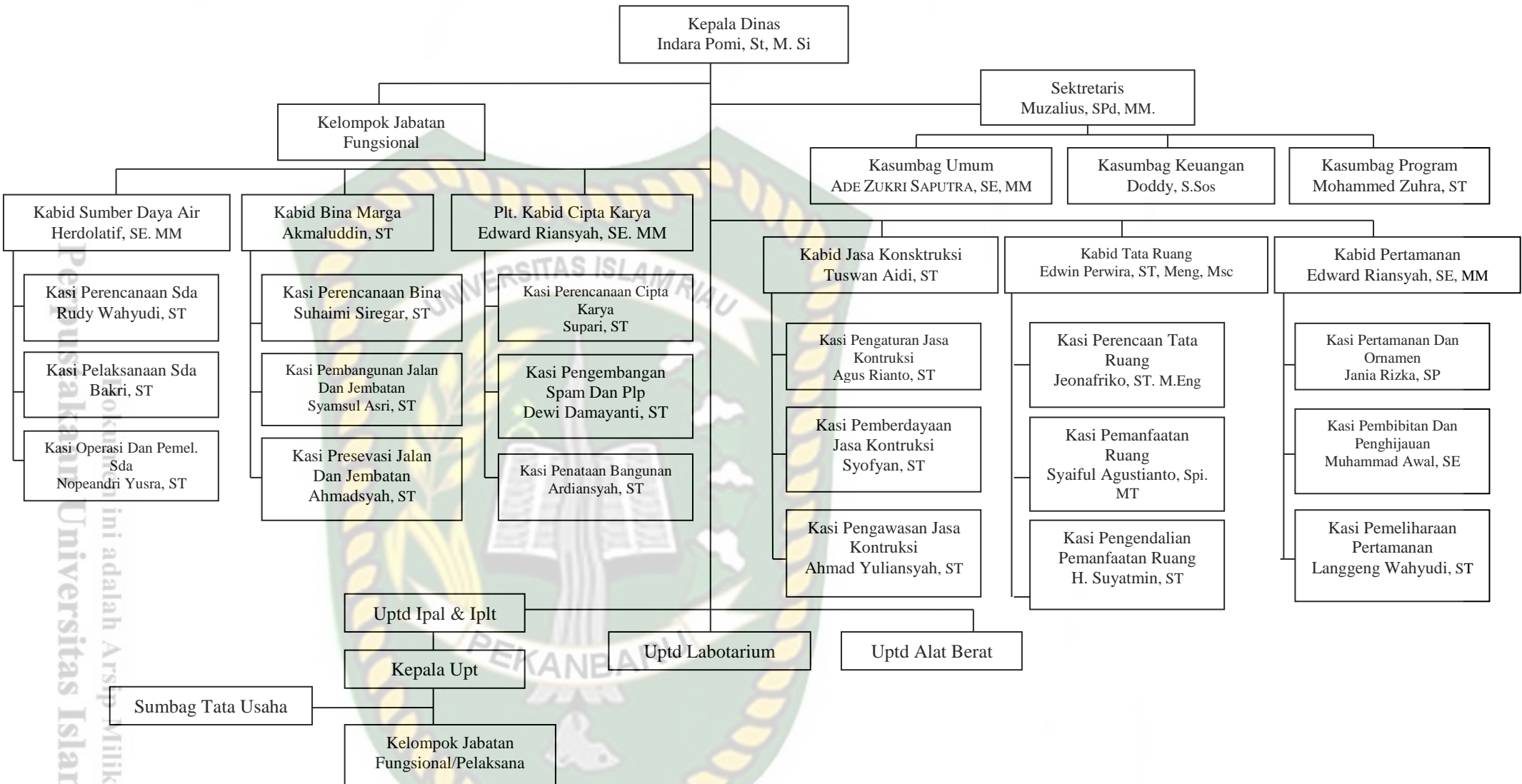
1. Seksi Pertamanan dan Ornamen.
2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru**

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU



## **E. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)**

### **Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, dan Tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan, pertamanan, penghijauan. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan, hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
  1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan
  2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
  3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
  1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
  3. Seksi Retribusi dan Penagihan
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## **1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

### **a) Visi**

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang madani.

### **b) Misi**

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau
3. Kota Pekanbaru sebagai kota indah



4. Kota Pekanbaru sebagai kota madani
5. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

### **(DLHK) Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebgai urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

#### **Tugas :**

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan, dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.

- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan keersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat,
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

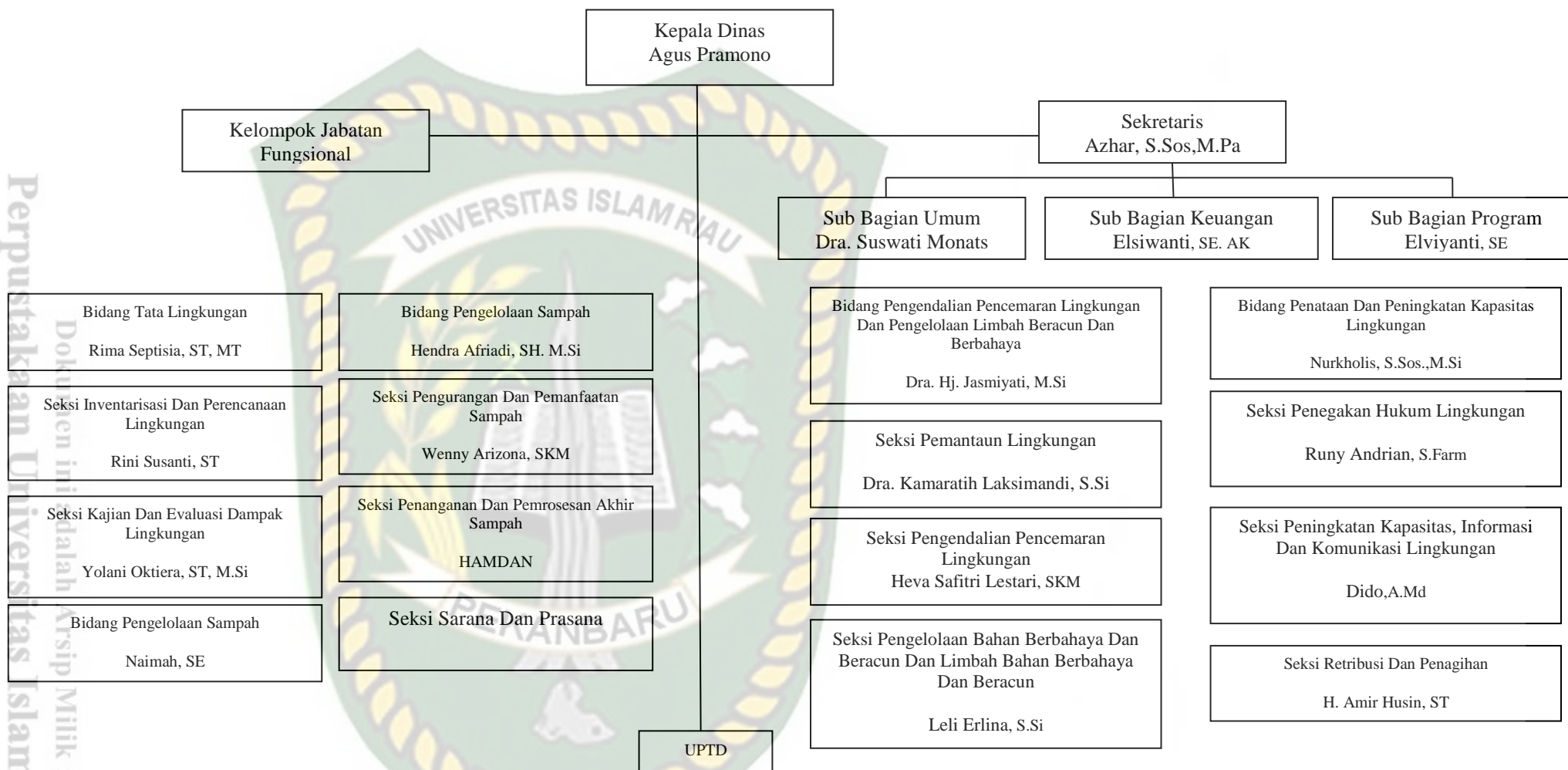
**3. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru memakai sistem berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantaranya kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

**Gambar IV.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2020



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk menyempurnakan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikan dalam bentuk table pembahsan dibawah ini:

**Tabel V.1: Identitas Responden Penelitian Penulis Terkait tentang Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.**

No.	Nama	Umur	Posisi/Status	Tempat Kerja
1.	Syaiful Agustianto	52	Kepala UPT IPAL	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Alpa Paltini	34	Kasubag TU UPT IPAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
3.	Jasmiyati	55	Kabid Pengendalian pencemaraan lingkungan dan pengolahan limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

4.	Putri Nabila Salsabila	21	Masyarakat yang bermukim disekitar pengadaan IPAL	Kota Pekanbaru
5.	Ari Suyatna	22	Masyarakat Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang, yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori efektivitas menurut Gibson yang mana kriteria efektivitas yang dimaksud dalam pembahasan dibawah ini.

#### **B. Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru.**

Efektivitas dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang di inginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan bertujuan untuk melihat apakah kebijakan yang di lakukan tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau mengalami kendala dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan ataupun tidak. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat,

tentunya harus dilakukan upaya peningkatan. Dalam melakukan efektivitas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentunya harus menggunakan indikator yang jelas dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta visi dan misi yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan tersebut nantinya.

Membangun sebuah pelayanan kepada masyarakat bukan hanya mencakup hal administrasi tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat salah satunya lingkungan yang memiliki sanitasi yang baik, namun dalam penerapannya tentu saja ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus disikapi secara bijaksana demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Intalasi Pengolahan Air Limbah merupakan suatu bentuk implementasi nyata dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam penerapan standar pelayanan minimal oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2010). Instalasi Pengolahan Air Limbah dimulai pembangunannya pada tahun 2018. Kegunaan dari IPAL ini nantinya sebagai tempat mengolah sisa air selama proses pembuangan segala bentuk kegiatan yang dapat menampung sambungan beberapa rumah di permukiman yang nantinya diolah terlebih dahulu sebelum di buang kembali ke badan air. Standar pelayanan publik yang diharapkan dari pengadaan IPAL nantinya adalah produksi kebijakan yang dibutuhkan oleh lingkungan, efisiensi dari segala aspek setelah adanya IPAL, serta kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru yang merasa terbantu sanitasinya.

Namun dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan IPAL tentunya terdapat kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga di anggap perlu

dilakukan pengkajian seberapa efektivitasnya kebijakan tersebut untuk nantinya membantu sanitasi permukiman di Kota Pekanbaru dari segi produksi pemerintah yang mana merupakan kebijakan itu sendiri, efisiensi sumber daya dan biaya yang dihasilkan, serta kepuasan masyarakat.

### **1. Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada instansi yang mengelola pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru dalam bentuk wawancara kualitatif.

Kebijakan merupakan rancangan atau tindakan pemerintah yang dibutuhkan dalam suatu negara dalam memecahkan suatu permasalahan publik. Kebijakan tersebut merupakan suatu pendukung pelayanan yang disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, dalam penelitian ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di limpahkan ke pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang mana pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Namun pada dasarnya setiap kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja, namun harus bermanfaat untuk khalayak ramai. Adapun alasan kebijakan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah, berikut hasil wawancara penulis

dengan Bapak Syaiful Agustianto, Spi, MT. selaku Kepala UPT IPAL yang menyatakan bahwa ;

*“ Karena Kota Pekanbaru yang perkembangannya cukup pesat di Pulau Sumatera , bisa dibilang sangat membutuhkan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ini. Ditambah lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya tentu berpengaruh kepada menurunnya jumlah air bersih, sedangkan masyarakat Kota Pekanbaru kebanyakan masih menggunakan air tanah. Nah, oleh karena itu pengolahan sanitasi merupakan salah satu unsur yang harus di prioritaskan, yang mana IPAL ini salah satu program dari Strategi Sanitasi Kota (SSK).”*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru memang sudah membutuhkan kebijakan pengolahan air limbah rumah tangga, yaitu dengan di keluarkannya kebijakan pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru, disamping itu dengan adanya kebijakan pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru akan berdampak baik bagi sanitasi lingkungan di Kota Pekanbaru sendiri.

Dalam Pemerintahan Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru memiliki Standar Pelayanan Minimal yang diikat dengan regulasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang membahas mengenai pengolahan air minum dan air limbah. Instalasi Pengolahan Air Limbah itu sendiri merupakan pemenuhan dari Standar Pelayanan Minimal yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara mengenai instansi yang ikut serta bertanggung jawab dalam pengadaan IPAL tersebut dengan Bapak Syaiful Agustianto,Spi,MT selaku Kepala UPT IPAL, yang menyatakan bahwa ;



*“ instansi yang terkait dalam proyek tersebut ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, serta Project Implementation Support Consultant (PISC) sebagai pihak yang mengurus masalah sosialisasi dan pendekatan intens ke masyarakat. Dalam pengadaan IPAL ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menggandeng beberapa kontraktor, ada Adhi Karya, ada Utama Karya, ada Wijaya Karya sebagai pihak yang mengatur mengenai pembangunan jaringan pipa, sedangkan yang menangani tentang pembangunan instalasi pengolahan limbah sendiri itu PT. PP milik BUMN. Kunci dari pengadaan IPAL tidak hanya memperhatikan masalah infrastruktur aja, tapi juga kemauan dari masyarakat yang ingin dilayani dan berlangganan dengan IPAL tersebut, dikarenakan nantinya akan dikenakan juga biaya retribusi.”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa instansi yang bertanggung jawab dalam kebijakan pengadaan IPAL terdiri dari beberapa instansi pemerintahan yang saling bekerjasama dan berbagi tugas demi penerapan IPAL di Kota Pekanbaru, namun dalam kebijakannya sendiri, meskipun IPAL merupakan salah satu penerapan program strategi sanitasi kota yang di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, namun dalam pembangunan infrastruktur, DLHK tidak turut campur didalamnya. Hal itu dijelaskan langsung oleh Ibu Dra. Hj. Jasmiyati, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan Limbah Beracun Dan Berbahaya, beliau menyatakan bahwa :

*“terkait kebijakan pengadaan IPAL di Kota Pekanbaru, DLHK tidak berpartisipasi dalam aspek pembangunan infrastruktur, nantinya DLHK hanya bertugas membantu mengolah limbah yang sudah di alirkan ke jaringan IPAL itu, dan nantinya juga DLHK akan memastikan apakah limbah sudah dikelola dengan baik dan tidak berbahaya dan beracun bagi lingkungan, sehingga sudah bisa atau belum untuk dibuang ke sungai, itu saja.”*

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun IPAL merupakan salah satu penerapan strategi sanitasi kota, namun DLHK sendiri berpartisipasi dalam pengelolaan IPAL ketika sudah beroperasi. Infrastruktur

IPAL sepenuhnya dibangun oleh pemerintah pusat dan tentunya menggunakan dana yang berasal dari APBN dan Dana ADB (Asean Doplement Bank) yang merupakan pinjaman negara yang dihibahkan ke pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah nantinya hanya akan mengelolanya saja. Pemerintah pusat sendiri memiliki kewajiban mencari 1.500 sambungan rumah agar IPAL tersebut dapat berjalan dan dilakukan pelayanan, sedangkan pemerintah kota memiliki target sambungan rumah yang ingin di capai sebanyak 10.000 sambungan, hal tersebut tentu saja menjadi tantangan baru bagi pemerintah, selain melakukan pembangunan infrastruktur, pemerintah pusat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui konsultan yang ditunjuk yaitu PISC, dan juga mencari 1.500 sambungan rumah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki target 10.000 sambungan rumah akan terus melakukan pengadaan namun secara bertahap. Dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sudah disiapkan Peraturan Daerah mengenai Air Limbah dan Retribusi Air Limbah, yang berkasnya sudah masuk ke DPRD, yang nantinya berisi tentang kewajiban masyarakat untuk berlangganan dikarenakan menyangkut kepentingan sanitasi lingkungan.

Terkait persiapan pembangunannya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alpa Patini selaku Kasubag TU UPT IPAL, yang menyatakan bahwa;

*“ Pengadaan IPAL berjalan 2 tahap, yang pertama itu, pembangunan jaringan pipa, terus yang kedua ada pembangunan instalasi, dimana pengolahannya yang akan dimulai pembangunannya pada tahun 2021, yang mana seluruh pembangunan 2 tahap tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2023.”*

Terkait lokasi pembangunannya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alpa Patini selaku Kasubag TU UPT IPAL, yang menyatakan bahwa ;

*“lokasi-lokasi pembangunan yang kami pilih berada di 5 kecamatan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, dan yang terakhir di Kecamatan Tenayan Raya. Alasan kami memilih lokasi tersebut karena melihat dari padat nya penduduk di daerah tersebut, terus juga karena padat nya penduduk akan mempengaruhi tingkat sanitasi lingkungan kan?. sedangkan pembangunan instalasi pengolahannya itu dilakukan di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, daerah itu juga dipilih karena IPAL sendiri itu kan menggunakan sistem gravitasi yang mana terus mengalir kepermukaan yang lebih rendah maka dibutuhkan daerah yang kondisi tanahnya menurun, Nah karena itu lah kami memilih daerah ini karena daerah ini memiliki topografi tanah yang menurun.”*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengadaan IPAL sendiri merupakan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang di katagorikan sebagai Rancangan Jangka Menengah) yang memiliki waktu pengadaan selama 5 Tahun, sedangkan IPAL sendiri sudah masuk tahun ke tiga pengerjaan pembangunan infrastruktur, oleh sebab itu diharapkan pada tahun 2023 seluruh pembangunan infrastruktur akan rampung dan akan dapat beroperasi secepat mungkin. Adapun pemilihan lokasi pembangunan jaringan perpipaan dilihat dari wilayah-wilayah di Kota Pekanbaru yang padat penduduknya sehingga di rasa perlu untu membantu permasalahan sanitasi lingkungan melalui pengadaan IPAL sendiri.

Lalu dalam tahap sosialisasi peneliti juga mewawancara Bapak Syaiful Agustianto, Spi. MT sebagai Kepala UPT IPAL mengenai bagaimana usaha instansi dalam mensosialisasikan kebijakan IPAL, beliau menyatakan bahwa ;

*“ Tahap sosialiasi dilakukan oleh konsultan yang telah di tunjuk yaitu PISC, mereka akan menjelaskan kepada masyarakat terkait pentingnya IPAL, dan juga. Dan perlunya disosialisasikan juga karena dengan adanya pembangunan ini*

*tentunya akan muncul gangguan-gangguan, salah satunya lalu lintas seperti ada galian-galian jalan yang cukup mengganggu sistem transportasi dalam kota. ”*

Dari hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan produksi dari pemerintah ialah sebuah kebijakan yang dibutuhkan oleh lingkungan itu sendiri, yang akan berdampak bagi lingkungan yang dilakukan penerapan kebijakan tersebut dan tentunya juga masyarakat sekitar. Kebijakan pengadaan IPAL adalah salah satu kebijakan yang di butuhkan oleh Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut yang mendasari mengapa IPAL harus diadakan secepat mungkin, mengingat karena Kota Pekanbaru sendiri merupakan Ibu Kota Provinsi yang menjadi tujuan masyarakat luar daerah melakukan urbanisasi untuk mencari peluang kerja. Hal tersebut tentunya akan berdampak kepada kenaikan jumlah penduduk yang semakin padat dan akan berpengaruh kepada aspek sanitasi jika tidak dikelola dengan baik dan benar.

## **2. Efisiensi**

Dalam suatu kebijakan publik yang akan di jalankan tentu saja harus memperhatikan faktor efisiensi yang mana ialah penggunaan sumber daya baik sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif. Pada bidang pemerintahan diharapkan pemerintah lebih jeli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kebijakan-kebijakan yang di buat juga harus berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga dampaknya bisa dirasakan secara bersama.

Dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru, tentunya harus memperhatikan factor efisiensi sumber daya yang digunakan seperti sumber daya manusia yang dibutuhkan, waktu pembangunan, serta biaya yang digunakan. Namun dengan adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi tentunya berpengaruh kepada target waktu penyelesaian yang tentunya berdampak kepada semakin lamanya waktu yang dibutuhkan agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Namun menurut informan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu Bapak Alpa Paltini sebagai Kasubag TU UPT IPAL memaparkan bahwa ;

*“pandemi Covid-19 ini tidak terlalu berpengaruh kepada progres yang terjadi di lapangan, segala bentuk pembangunan terus berjalan kok dan dilakukan dengan se-efisien mungkin namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang di tetapkan demi tercapainya target, seperti pengerjaan SC 1 yang akan rampung pada tahun 2022 dan instalasi pengolahannya yang sudah mulai pembangunannya pada awal 2021 ini.”*

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa baik dari segi efisiensi waktu Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah melakukan dengan seefisien mungkin, tidak terjadi kendala-kendala yang berarti meskipun sedang melakukan proses pembangunan di masa pandemi, segala bentuk kegiatan baik diluar ruangan ataupun di dalam ruangan yang terkait dengan pembangunan IPAL dilakukan dengan protokol kesehatan yang lengkap untuk meminimalisir penyebaran virus corona yang sedang terjadi.

Kebijakan dapat dikatakan efektif dan efisien jika kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat serta aspek lainnya, untuk mengetahui

hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syaiful Agustianto, Spi. MT, beliau menyatakan bahwa :

*“kebijakan pengadaan IPAL memiliki keuntungan yang akan didapatkan ketika program tersebut selesai, khususnya bagi masyarakat yang mau berlangganan dan dilayani oleh IPAL tersebut, pencemaran air tanah tentunya akan berkurang yang akan memberikan dampak positif kepada kesehatan masyarakat, disamping itu juga masyarakat Kota Pekanbaru yang mayoritas masyarakatnya menggunakan septic tank serta memanfaatkan air tanah sebagai sumber air sehari-hari yang berdampak kepada sangat beresikonya terjadi kebocoran zat berbahaya yang berasal dari septic tank dan limbah rumah tangga jika terus menerus tidak dikelola dengan benar dalam kurun waktu yang lama. Maka kami mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam mengoptimalkan kebijakan IPAL agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. “*

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan keuntungan utama yang akan didapatkan dari adanya IPAL tentunya mengenai sanitasi lingkungan yang akan lebih terjaga dengan baik, berkurangnya sumber pencemaran di badan sungai akibat pembuangan limbah rumah tangga yang dibuang tdiak pada tempatnya. Dalam aspek lingkungan, di Kota Pekanbaru khususnya terdapat sejumlah parbrik, dan industri perkantoran yang menghasilkan limbah serta hasil buangan masyarakat yang sebagian besar di buang ke sungai siak tanpa di olah terlebih dahulu, namun nantinya dengan adanya IPAL, air limbah akan mengalami proses filter yang meminimalisir zat berbahaya yang terkandung di dalam limbah tersebut sebelum dibuang ke badan air seperti sungai. Hal tersebut tentu saja akan mengurangi pencemaran sungai itu sendiri. Selama ini juga air limbah domestic/rumah tangga dan industri perkantoran masuk ke saluran drainase sehingga membebani daya tamping drainase (parit), dengan adanya IPAL, air limbah tersebut tidak akan lagi dibuang ke drainase, drainase hanya akan dibebani oleh air hujan saja, sehingga dapat mengurangi resiko banjir.

Efisiensi dari aspek pembiayaan juga harus di perhatikan, namun hal itu dapat diukur setelah IPAL rampung dan fungsional. Menurut Bapak Alfa Paltini sebagai Kasubag TU UPT IPAL, menyatakan bahwa:

*“ pembiayaan berasal dari pemerintah pusat yang memakai Dana APBN dan ADB (Dana Pinjaman) sehingga kami belum dapat mengukur efisiensi anggaran sepenuhnya, kalo pengadaan IPAL sudah berjalan barulah segala bentuk biaya pengelolaan menggunakan anggaran APBD.”*

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai efisiensi dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi Di Kota Pekanbaru belum dapat dihitung secara keseluruhan, namun dari efisiensi sumber daya yang dipakai seperti sumber daya manusia yang di gunakan dalam proses pembangunan infrastruktur sudah dapat dikatakan efisien karena jumlah yang ada dilapangan sesuai dengan yang diperlukan, adapun dari efisiensi waktu meskipun terjadi pandemi pada saat ini, segala bentuk pengerjaan baik dilapangan ataupun di dalam ruangan tetap dilakukan, demi tercapainya target yang sudah ditentukan. Namun dari segi biaya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum dapat menyimpulkan apakah sudah efisien atau belum dikarenakan segala kebutuhan pembiayaan saat ini masih menggunakan Dana APBN dan ADB yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat, setelah proses pembangunan rampung dan dapat di operationalkan, barulah segala bentuk pembiayaan memakai dana APBD dan dana yang berasal dari retribusi masyarakat yang berlangganan IPAL.

### 3. Kepuasan

Suatu kebijakan publik tidak dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat tidak merasa puas. Maka oleh sebab sebelum dan sesudah kebijakan itu diadakan, pemerintah harus mendengarkan pendapat dari masyarakat. Dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru membasas mengenai kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru dengan adanya kebijakan IPAL tersebut.

Dalam wawancara peneliti kepada Kasubag TU UPT IPAL, yaitu Bapak Alpa Paltini, beliau menyatakan bahwa:

*“ Sosialisasi telah dilakukan oleh dinas dinas terkait kepada masyarakat. Sosialisasi IPAL dilakukan oleh konsultan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yaitu Pihak PISC (Project Implementation Support Consultant) kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat di jalur pemipaan, serta melalui media massa seperti koran dan sosial media. Sehingga sebagian masyarakat sudah mengetahui kebijakan IPAL tersebut. Masyarakat Kota Pekanbaru tentunya juga memahami dampak positif yang akan didapatkan dengan adanya IPAL, baik dari segi kesehatan ataupun lingkungan. “*

Namun dari wawancara peneliti lakukan kepada saudari Putri Nabila Salsabila sebagai masyarakat yang bermukim di daerah pembangunan jalur pemipaan mengatakan bahwa;

*“ saya mengeluhkan adanya kerusakan pada jalan disekitar rumah saya yang menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan, terus juga menyebabkan jalan berlumpur kalau hujan dan berdebu kalau cuaca panas, terus juga masalah kebisingan yang berasal dari alat berat yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. ”*

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat yaitu Saudara Ari Suyatna sebagai pengguna jalan jalur pemipaan,



untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kota Pekanbaru mengenai pengadaan IPAL tersebut, informan tersebut mengatakan bahwa :

*“menurut saya pribadi sebagai pengguna jalan, pembangunan ini mengganggu sih. menyebabkan macet, polusi udara. Polusi dan suara juga. Harapannya sih pembangunanya dipercepat agar lalu lintas kembali normal. kalau soal IPAL, saya sendiri baru denger, semoga saja IPAL ini berguna untuk masyarakat Kota Pekanbaru khussunya, supaya kedepannya kita gak ketinggalan jauh sama negara negara maju seperti yang udah menggunakan pipa jalan untuk menyalurkan gas dan air kerumah rumah”*

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa terganggu dengan adanya pembangunan jalur pemipaan yang memakan tempat di beberapa ruas jalan transportasi dalam kota, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan keluhan masyarakat kepada dinas terkait, lalu Bapak Syaiful Agustianto selaku perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Pekanbaru, menanggapi mengenai keluhan masyarakat dan memberikan jalan keluar dari ketidak puasan masyarakat Kota Pekanbaru mengenai pembangunan IPAL. Beliau mengatakan bahwa :

*“ karena itu lah konsultan melakukan pendekatan secara intens kepada masyarakat agar dapat memahami situasi tersebut lalu mencari solusi untuk semua keluhan tersebut karena nantinya IPAL tersebut juga akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. ”*

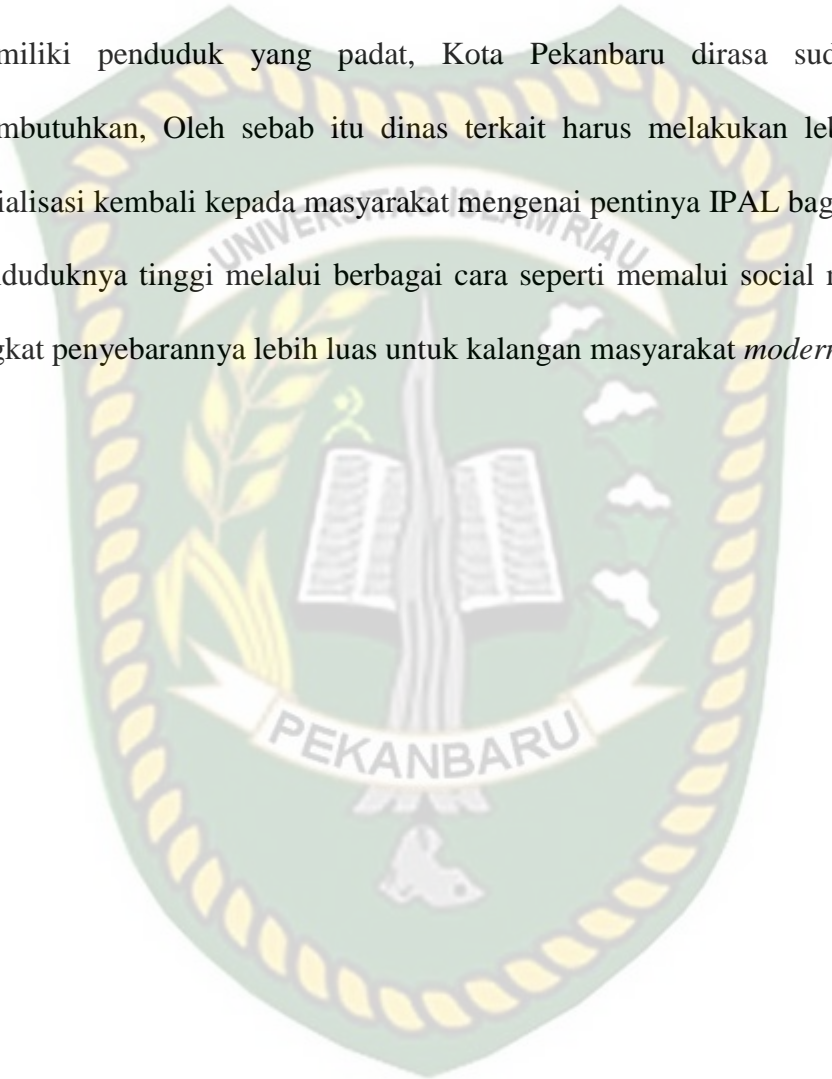
Dari uraian percakapan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengadaan IPAL memang sudah diperlukan bagi lingkungan Kota Pekanbaru, dan dengan IPAL tersebut nantinya akan berdampak positif kepada sanitasi di Kota Pekanbaru untuk jangka panjang. Penerapannya sendiri sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir, mengenai efisiensi dalam kebijakan tersebut baik dari aspek sumber daya dan waktu dapat dikatakan efektif dan efisien, namun dalam aspek pembiayaan belum dapat di simpulkan dikarenakan dalam tahap penerapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur saat ini seluruh pembiayaan masih ditanggung oleh pemerintah puast melalui dana APBN dan ADB. Selanjutnya, kepuasan masyarakat mengenai penerapan kebijakan tersebut tentunya di anggap penting mengingat kebijakan dibuat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti terjaganya kualitas air dan tanah dari terpaparnya zat berbahaya yang berasal dari *septic tank*, dan terjaganya sanitasi di permukiman masyarakat dari pencemaran limbah rumah tangga, namun dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh dinas terkait melalui konsultan yang ditunjuk kepada masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga masih terdapat keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat mengenai pengadaan IPAL sendiri, tetapi jika dilakukan sosialisasi lebih intens kepada masyarakat, masyarakat dapat memaklumi mengenai dampak *negative* yang berlangsung sementara akibat pembangunan yang sedang berlangsung saat ini.

## **F. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru**

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tentang Efektivitas Kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru. Pada Umumnya ditemukan beberapa masalah yang ditemukan penulis selama melakukan penelitian. Permasalahan yang muncul antara lain ;

- 1) Di lihat dari indikator produksi, yang mana ialah kebijakan IPAL itu sendiri, Kondisi lokasi jalur perpipaan yang berada di permukiman yang padat yang menjadi tantangan sendiri bagi kontraktor untuk melakukan pembangunan yang tetap memperhatikan keamanan serta kenyamanan baik bagi pekerja dikarenakan lokasi pembangunan di badan jalan yang terdapat banyak kendaraan yang melintas yang dapat membahayakan serta bagi masyarakat yang menggunakan jalan di jalur perpipaan dan yang bermukim di sekitarnya,
- 2) Di lihat dari indikator efisiensi, target penyelesaian waktu pembangunan yang belum pasti akan tercapai dikarenakan beberapa faktor seperti terjadinya pandemic *Covid-19* dan faktor cuaca yang tidak dapat di prediksi yang tentu saja berdampak kepada waktu pekerjaan yang belum efisien, apalagi pembangunan jalur perpipaan dilakukan di badan jalan yang dilalui oleh masyarakat sevara intens 24 jam, yang tentunya menjadi tantangan bagi kontraktor dalam proses pembangunanya

- 3) Di lihat dari indikator kepuasan, dari asih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pengadaan IPAL yang menimbulkan sugesti bahwa Kota Pekanbaru belum membutuhkan IPAL tersebut, sementara sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki penduduk yang padat, Kota Pekanbaru dirasa sudah sangat membutuhkan, Oleh sebab itu dinas terkait harus melakukan lebih banyak sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai pentingnya IPAL bagi kota yang penduduknya tinggi melalui berbagai cara seperti melalui social media yang tingkat penyebarannya lebih luas untuk kalangan masyarakat *modern* saat ini.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) Efektifitas kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru, di lihat dari indikator produksi sudah dapat dikatakan efektif dikarenakan kebijakan yang di keluarkan dibutuhkan oleh Kota Pekanbaru sendiri, yang mana memiliki jumlah penduduk yang padat sebagai kota yang terus berkembang, di lihat dari indikator efisiensi sudah melakukan langkah-langkah agar waktu pengerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya meskipun terjadi kendala pandemic *Covid-19*. Dalam aspek pembiayaan seluruhnya di tanggung oleh pemerintah pusat yang berasal dari Dana APBN dan dana ADB, sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memastikan seberapa efisien dana yang digunakan sebelum IPAL dapat beroperasi, di lihat dari indikator kepuasan, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang berada di jalur perpipaan serta pengguna jalan lokasi perpipaan yang mana masyarakat tersebut merasa puas mengenai kebijakan tersebut dikarenakan IPAL tersebut dianggap mampu membantu sanitasi lingkungan untuk jangka panjang serta mengurangi resiko terjadinya banjir dikarenakan pembuangan sisa limbah rumah tangga.
- 2) Faktor Penghambat Efektifitas kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pengadaan IPAL yang menimbulkan sugesti bahwa Kota Pekanbaru belum membutuhkan IPAL tersebut, sementara sebagai Ibu Kota Provinsi yang memiliki penduduk yang padat, Kota Pekanbaru dirasa sudah sangat membutuhkan, Oleh sebab itu dinas terkait harus melakukan lebih banyak sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai pentingnya IPAL bagi kota yang penduduknya tinggi.
- b) Target penyelesaian waktu pembangunan yang belum pasti akan tercapai dikarenakan beberapa faktor seperti terjadinya pandemic *Covid-19* dan factor cuaca yang tidak dapat di prediksi yang tentu saja berdampak kepada waktu pekerjaan yang belum efisien
- c) Kondisi lokasi jalur perpipaan yang berada di permukiman yang padat yang menjadi tantangan sendiri bagi kontraktor untuk melakukan pembangunan yang tetap memperhatikan keamanan serta kenyamanan baik bagi pekerja dikarenakan lokasi pembangunan di badan jalan yang terdapat banyak kendaraan yang melintas yang dapat membahayakan serta bagi masyarakat yang melintas di jalur perpipaan dan yang bermukim di sekitarnya.

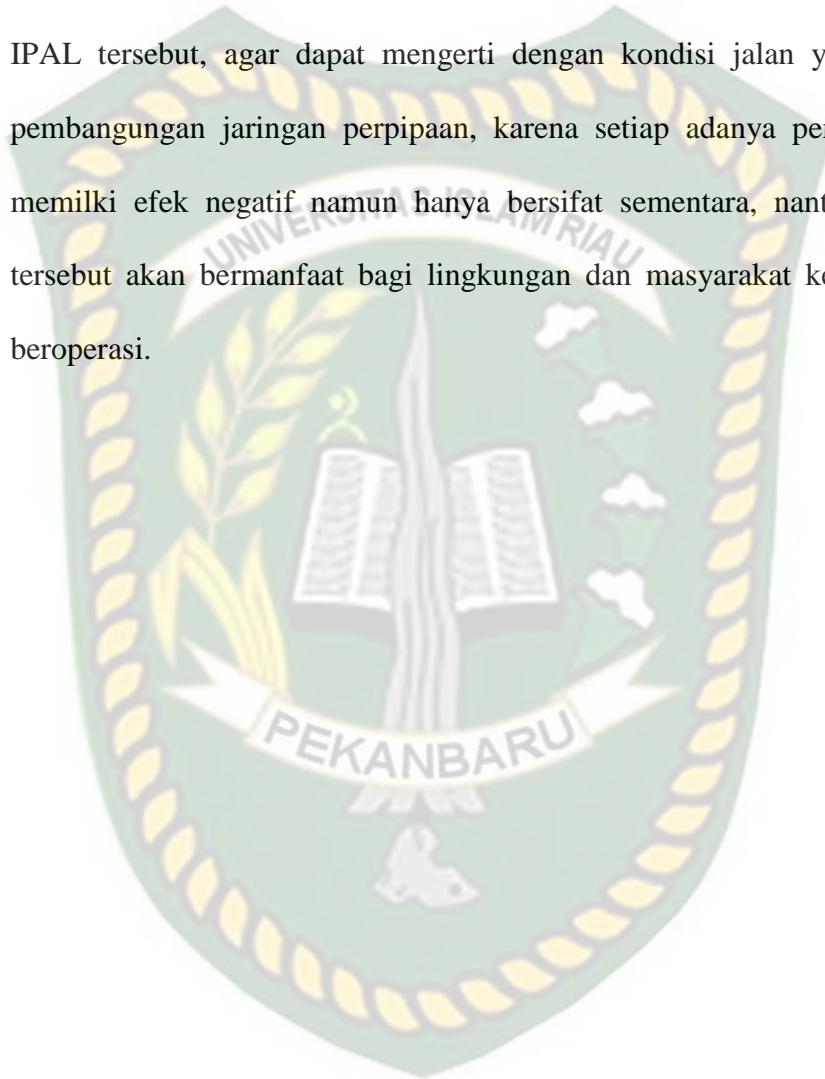
## B. Saran

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan kebijakan program Pemerintah Pusat yang di limpahkan ke Pemerintah Daerah yang mana Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya pada sektor sanitasi lingkungan. Agar Efektifitas kebijakan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Dalam Rangka Meningkatkan Sanitasi di Kota Pekanbaru berjalan dan terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan maka yang perlu dilakukan adalah :

- 1) Terkait sosialisasi kebijakan pengadaan IPAL yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui konsultan yang ditunjuk serta instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pengadaan IPAL tersebut agar dapat lebih mensosialisasikan pentingnya IPAL bagi lingkungan dan kesehatan kepada masyarakat Kota Pekanbaru, agar menghilangkan pola pikir masyarakat yang memandang bahwa IPAL belum di butuhkan bagi Kota Pekanbaru.
- 2) Terkait pembangunan IPAL yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melalui kontraktor yang ditunjuk, agar lebih memperhatikan lokasi pembangunan yang berlumpur ataupun berdebu yang dapat membahayakan pengendara transportasi dan masyarakat sekitar sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan.
- 3) Terkait pengadaan IPAL yang mempunyai target 11.000 sambungan rumah, sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru segera melakukan pendataan kepada masyarakat yang mau

berlangganan agar nantinya IPAL dapat berjalan dengan efektif dan efisien pengelolaannya baik secara teknis maupun administrasi.

- 4) Terkait keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan pembangunan IPAL tersebut, agar dapat mengerti dengan kondisi jalan yang dilalui pembangunan jaringan perpipaan, karena setiap adanya pembangunan memiliki efek negatif namun hanya bersifat sementara, nantinya IPAL tersebut akan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat ketika sudah beroperasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Australia Indonesia Partnership. 2011 . Laporan Akhir Rencana Induk Investasi Air Limbah Kota Pekanbaru. Indonesia Infrastructure Initiative.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, John. W. 2016. “Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat.”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.
- Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Pembaruan.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rejeki, S. (2015). *Sanitasi Hygiene dan K3*. Bandung: *Rekayasa Sains*.
- Rudy Yuwono, dkk, Ternyata Bisa, Cerita Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Indonesia, Jakarta: Sekretariat Kelompok Kerja AMPL, 2015, hlm.15
- Safitri, P. A., Purba, W. S., & Zulkifli, M. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018-Pengelolaan Sampah di Indonesia*. BPS-Subdirektorat *Stat. Lingkung. Hidup*, 1-43.

Taufiqurrokhman, 2014, Kebijakan publik pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan, Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers

Trianto, 2011, Model Pembelajaran Terpadu Konsep,Strategi Dan Implementasinya Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jakarta : Bumi Aksara.

Ulber Silalahi, 2009, Metodologi Penelitian Sosial, Bandung:PT Refika Aditama

Waluya, Bagja, Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses tanggal 25 September 2020,

#### **B. Jurnal**

Asnawi. 2013,Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota , Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6

Darmanto. (2006). “Organisasi Pemerintah Daerah:Mewujudkan Tata Pamong Yang Baik (Good Governance)”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka. Volume 2, Nomor 1, Hal 35-49.

Desrianti,F. (2019). ” Evaluasi Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi Di Kota Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Ilmu Pemerintahan,Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Harivarman, D. (2017). Hambatan komunikasi internal di organisasi pemerintahan. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 508-519.

Iskandar,F, & Arianto, R. (2016). Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Terpusat Skala Permukiman. Kementerian Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat Direktorat jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Kharisma, D., & Yuniningsih, T. (2017). Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 770-781.

Nafi'ah, B. (2015). Implementasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Kounal: Model Tata Kelola Lingkungan Deliberatif dalam Good Environmental Governance di Kota Blitar. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(3).

Nurcholis, H. (2011). Hubungan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2(2).

Otaki, Y., Otaki, M., & Sakura, O. (2007). Water systems and urban sanitation: a historical comparison of Tokyo and Singapore. *Journal of water and health*, 5(2), 259-265.

Panggulu, Y. T. (2013). Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2(4).

RAHMAWATI, P. (2014). *Pengelolaan Metode Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Dalam Mengatasi Pencemaran Air Tanah Dan Air Sungai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Ramadhani, F., & Isril, I. (2016). *Strategi Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Riau University).

Saputri, S. F. (2018). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Ipal Komunal di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Sari, Febriliani, & Kurniati. (2018). *Organisasi Pemerintahan Daerah*. Universitas Lampung.

Setiawan, H. (2014). Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan (Studi Eksplanatif Tentang Efektivitas Kegiatan Orientasi Perpustakaan Terhadap Pemanfaatan Layanan Pada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya). *Journal Universitas Airlangga*, 3, 1-18.

Ulum. Ihyaul MD, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*. Malang, UMM Press, Hlm. 294

Yula, Hubungan sanitasi Rumah Tinggal Dan Hygiene Perorangan Dengan Kejadian Dermatitis Di Desa Moramo Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, Skripsi, Universitas Haluoleo, Kendari, 2006, h. 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi kawasan industri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang kebijakan dan strategi nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik

#### **D. Website**

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.(2020).

Retrieved Desember 30, 2020, from <https://pekanbarukota.bps.go.id/>

Rocket. (2017). Pengertian Sanitasi, Ruang Lingkup, Tujuan Beserta Manfaatnya.

Retrieved Maret 10, 2018, from <http://rocketmanajemen.com/definisisanitasi>

Yuan. (2019). Pengolahan Air Limbah Domestik. Retrieved Juli, 2019, from

<https://www.yuanblower.xyz/2019/07/pengolahan-air-limbah-domestik.htm>